

# STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN PROVINSI LAMPUNG 2014



<http://lampung.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI LAMPUNG**

# STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN PROVINSI LAMPUNG 2014



<http://lampung.bps.go.id>

# STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN PROVINSI LAMPUNG 2014

Nomor Katalog : 4601001.18  
Nomor ISBN :  
Nomor Publikasi : 18521.15.21

Ukuran Buku : 21,5 x 29,7 cm  
Jumlah Halaman : 58

Naskah  
Seksi Statistik Ketahanan Sosial  
Bidang Statistik Sosial

Gambar Kulit/Sampul  
Seksi Statistik Ketahanan Sosial

Diterbitkan oleh  
Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya.

<http://lampung.bps.go.id>

## Kata Pengantar

Publikasi Statistik Politik dan Keamanan 2014 merupakan publikasi pertama Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung yang menyajikan data tentang keamanan, hasil pemilu legislatif dan pemilihan presiden/wakil presiden, serta data lainnya yang berkaitan dengan politik dan keamanan. Data yang disajikan berupa data sekunder bersumber dari Polres/Polresta/Polda, KPU, DPRD, Bappeda, Humas, dan data primer hasil survei BPS yaitu Podes 2014 dan Survei Statistik Politik dan Keamanan 2014

Publikasi ini menyajikan gambaran tingkat keamanan di Provinsi Lampung melalui jumlah dan jenis tindak kriminalitas, pelaku, korban, serta upaya penanggulangannya. Sementara situasi politik di Provinsi Lampung berdasarkan informasi hasil pemilu dan gambaran pemelukada serta produk hukum yang dihasilkan DPRD.

Kepada semua pihak yang telah secara aktif berpartisipasi dalam pengumpulan data dan penyusunan publikasi ini disampaikan terima kasih. Saran dan kritik untuk perbaikan publikasi ini sangat diharapkan.

Akhirnya, semoga buku ini dapat membantu untuk melakukan evaluasi maupun analisis politik dan keamanan pada masa mendatang baik untuk politik Indonesia yang semakin matang dan keamanan yang mendukung pembangunan kesejahteraan.

Bandar Lampung, November 2015  
Kepala Badan Pusat Statistik  
Provinsi Lampung

Ir. Adhi Wiriana, M.Si



## Daftar Isi

	Halaman
<b>Kata Pengantar</b> .....	v
<b>Daftar Isi</b> .....	vii
<b>Daftar Tabel</b> .....	ix
<b>Daftar Grafik</b> .....	xv
<b>Bab 1 Pendahuluan</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	3
1.2. Maksud dan Tujuan .....	5
1.3. Ruang Lingkup .....	5
1.4. Sistematika Penulisan .....	6
<b>Bab 2 Metodologi</b> .....	7
2.1. Jenis dan Sumber Data .....	9
2.2. Konsep dan Definisi .....	9
<b>Bab 3 Gambaran Umum Kriminal Provinsi Lampung</b> .....	14
3.1. Sarana dan Prasarana Wilayah.....	16
3.2. Perkembangan Tindak Kejahatan di Provinsi Lampung.....	17
3.3. Presentase Desa/Kelurahan Yang Ada Tindak Kejahatan .....	19
3.4. Pelaku Tindak Kejahatan dan Upaya Menjaga Keamanan .....	22
<b>Bab 4 Gambaran Umum Politik Provinsi Lampung</b> .....	24
4.1. Lembaga Politik.....	26
4.1.1. Partai Politik.....	27
4.1.2. Dewan Perwakilan Rakyat.....	29
4.2. Kegiatan Politik.....	32
4.2.1 Pemilihan Umum .....	32
4.2.2 Pemilu DPRD .....	33
4.2.3 Pemilihan Kepala Daerah .....	36
<b>Bab 5 Demokrasi dan Keragaman Lampung</b> .....	39
5.1. Demokrasi .....	40
5.1.1. Perkembangan IDI Lampung.....	43
5.1.2. IDI Menurut Aspek.....	44

5.2. Keragaman Lampung .....	45
5.2.1. Keragaman Suku di Provinsi Lampung .....	46
5.2.2. Keragaman Agama di Provinsi Lampung .....	52
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>58</b>
<b>Tabel Lampiran</b>	

<http://lampung.bps.go.id>





# PENDAHULUAN

1

<http://lampung.bps.go.id>



## 1.1. Latar Belakang

Beberapa tragedi tindak kekerasan telah terjadi di Provinsi Lampung. Meskipun demikian, hingga saat ini situasi keamanan di Provinsi Lampung masih cukup kondusif. Ini ditandai dengan tidak adanya gejolak dalam sejumlah momen penting yang berdekatan dengan hari-hari penting seperti perayaan hari besar agama dan peringatan hari besar nasional.

Selain itu, tingginya tingkat kesadaran masyarakat untuk menjaga situasi kamtibmas di lingkungan mereka menjadi hal yang paling mendukung kondisi keamanan di wilayah Lampung.

Selain kondisi keamanan yang sempat terganggu, situasi politik di wilayah ini juga sempat mulai memanas dengan terjadinya beberapa peristiwa perselisihan yang telah melibatkan berbagai kalangan masyarakat dari kalangan masyarakat bawah sampai elit kultural. Namun hal ini masih dalam batas kewajaran karena mereka masih mengedepankan kedamaian, toleransi, dan kekompakan serta masih mempertahankan sinergi antar dimensi sosial dan politik. Pemerintahan juga dijalankan dengan tetap selalu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam menentukan kebijakan negara dan pemberian kebebasan masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya.

Dalam pemerintahan yang menganut sistem demokrasi dengan keterbukaan tersebut, secara tidak langsung akan memicu para pejabat daerah untuk lebih bekerja keras dan terbuka dalam menyelenggarakan roda pemerintahan.

Beragam kepentingan dalam masyarakat diberi ruang untuk diartikulasikan melalui berbagai saluran, salah satunya melalui jalur formal dengan membentuk partai politik. Partai-partai politik baru diijinkan dan diberi kemudahan untuk muncul sehingga jumlah partai yang sejak lima periode pemilihan umum (pemilu) sebelumnya konstan berjumlah tiga, bertambah hingga 15 partai pada pemilu tahun 2014, dan terus berubah pada pemilu-pemilu selanjutnya. Di sisi lain, setiap

manusia mempunyai kebutuhan primer yang harus terpenuhi, seperti sandang, pangan, dan papan. Selain itu setiap manusia juga berusaha untuk memenuhi kebutuhan sekunder, seperti kebutuhan sosial yaitu status sosial, peranan sosial, aktualisasi diri, dan terutama rasa aman.

Rasa aman ditandai dengan hidup yang tidak tertekan atau bahkan merasa bahwa hidup ini ada gunanya. Rasa aman merupakan salah satu hak asasi setiap orang. Hal itu sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi "Pemerintah dan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia". Kewajiban ini secara eksplisit juga tertuang dalam Pasal 30 ayat (4), amandemen kedua UUD 1945 yang antara lain menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

Rasa aman pada dasarnya mencakup aspek dan dimensi yang sangat luas, termasuk politik, sosial, dan ekonomi. Sejalan dengan itu, statistik dan indikator yang biasa digunakan untuk mengukur rasa aman masyarakat merupakan indikator negatif, misalnya angka kriminalitas (*crime total*). Semakin tinggi angka kriminalitas menunjukkan semakin banyak tindak kejahatan pada masyarakat yang merupakan indikasi bahwa masyarakat merasa semakin tidak aman.

Upaya untuk memenuhi dan menciptakan rasa aman pada masyarakat merupakan langkah strategis yang turut mempengaruhi keberhasilan pembangunan. Terciptanya dan terpenuhinya rasa aman pada masyarakat akan membangun suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktifitas termasuk aktifitas ekonomi. Kondisi ini pada skala makro akan menciptakan stabilitas nasional yang merupakan salah satu prasyarat bagi tercapainya pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Mewujudkan keamanan adalah tanggung jawab semua lapisan masyarakat yang didukung dengan sarana dan prasarana yang disediakan

pemerintah yang disertai dengan kesadaran masyarakat untuk ikut menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.

Melalui publikasi Statistik Politik dan Keamanan 2014 ini, berbagai informasi tentang fenomena politik dan keamanan tahun 2014 di Provinsi Lampung dicatat, didokumentasi dan ditampilkan secara berkala sebagai lanjutan dari publikasi tahun sebelumnya. Bagi pemerintah, data tersebut dapat digunakan untuk melakukan perencanaan, evaluasi, dan monitoring situasi politik dan keamanan agar tetap kondusif.

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

Secara umum, tujuan penyusunan publikasi ini adalah memberikan gambaran makro mengenai situasi dan kondisi keamanan dan politik masyarakat. Tujuan khususnya, adalah untuk memperoleh gambaran secara lengkap mengenai karakteristik kejadian tindak kriminalitas, konflik massal, dan peran serta masyarakat beserta DPRD Kabupaten/kota dan Provinsi Lampung dalam terwujudnya keamanan dan pembangunan politik.

Ketersediaan data politik dan keamanan sangat bermanfaat sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan. Ini mengingat dinamika politik seringkali berimbas pada bidang keamanan yang akan merambah ke bidang ekonomi, artinya perkembangan bidang politik dan keamanan, cepat atau lambat akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Sehubungan dengan itu diperlukan data statistik politik dan keamanan secara berkala dan berkesinambungan.

## **1.3. Ruang Lingkup**

Publikasi Statistik Politik dan Keamanan 2014 menyajikan gambaran politik, kejadian tindak kejahatan/kriminalitas dan kejadian konflik massal, serta upaya mewujudkan keamanan di wilayah Provinsi Lampung.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Publikasi ini terdiri dari empat bab. Pada Bab 1 Pendahuluan, menyajikan latar belakang, tujuan penyusunan publikasi, ruang lingkup dan sistematika penulisan. Bab 2 tentang metodologi membahas sumber data meliputi jenis dan sumber data, konsep dan definisi dan penjelasan teknis tentang statistik/indikator yang disajikan. Dua bab berikutnya menyajikan gambaran umum kriminalitas (Bab 3) dan gambaran umum politik di Provinsi Lampung termasuk bahasan Pemilu 2014, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, pemilihan kepala daerah (Bab IV), dan terakhir Bab 5 akan mengulas tentang demokrasi Indonesia, serta keragaman suku dan agama di Lampung.

# METODOLOGI

# 2

<http://lampung.bps.go.id>





Bab kedua membahas mengenai sumber data dan metode pengumpulan data. Selain itu, bab ini membahas konsep dan definisi yang digunakan dalam publikasi ini. Mengingat bahasan mengenai politik cukup luas, maka perlu adanya pembatasan pembahasan. Konsep dan definisi diperlukan untuk memberikan pengertian yang sama dalam memaknai data yang disajikan dalam publikasi ini.

## **2.1. Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam publikasi Statistik Politik dan Keamanan Provinsi Lampung 2014 ini bersumber dari data Badan Pusat Statistik (BPS). Data BPS yang digunakan dalam publikasi ini adalah data hasil Sensus Penduduk (SP) 2010 yaitu data tentang Penduduk menurut Suku Bangsa dan Penduduk menurut Agama. Data BPS lain juga ditemui pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), Potensi Desa 2014

Publikasi ini juga mengambil data dari instansi terkait, antara lain berasal dari Polres/Polresta/Polda, KPU, dan Bappeda Kabupaten/Kota Provinsi Lampung. Pada tingkat provinsi pengumpulan dilakukan oleh BPS provinsi, dan pada tingkat kabupaten/kota pengumpulan dilakukan oleh BPS Kabupaten/Kota.

## **2.2. Konsep dan Definisi**

Mengingat luasnya definisi yang digunakan dalam publikasi Statistik Politik 2014, diperlukan pembatasan konsep-konsep yang digunakan. Batasan ini akan membantu pemahaman pembaca akan konsep dan data-data yang ditampilkan dalam publikasi ini.

### **A. Peristiwa kejahatan (kriminalitas)/pelanggaran**

1. Tindak kejahatan/kriminalitas atau pelanggaran merupakan perbuatan seseorang yang dapat diancam hukuman berdasarkan KUHP atau undang-undang serta peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia.
2. Peristiwa yang dilaporkan ialah setiap peristiwa yang diterima kepolisian dari laporan masyarakat, atau peristiwa di mana pelakunya tertangkap tangan oleh kepolisian.
3. Peristiwa yang diselesaikan oleh kepolisian adalah
  - ✓ Peristiwa yang berkas perkaranya sudah siap atau telah diserahkan kepada jaksa.

- ✓ Dalam hal delik aduan, pengaduan yang dicabut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan menurut undang-undang.
- ✓ Peristiwa yang telah diselesaikan oleh kepolisian berdasarkan azas *Plichtmatigheid*.
- ✓ Peristiwa yang tidak termasuk kompetensi kepolisian.
- ✓ Peristiwa yang tersangkanya meninggal dunia.
- ✓ Peristiwa yang telah kadaluwarsa.

## **B. Pelaku Kejahatan**

Pelaku kejahatan adalah:

- ✓ Orang yang melakukan kejahatan.
- ✓ Orang yang turut melakukan kejahatan.
- ✓ Orang yang menyuruh melakukan kejahatan.
- ✓ Orang yang membujuk orang lain untuk melakukan kejahatan.
- ✓ Orang yang membantu untuk melakukan kejahatan.

## **C. Kejahatan Konvensional (Common Law Crime)**

Kejahatan konvensional (Common Law Crime) adalah kejahatan yang dianggap oleh semua orang sebagai kejahatan misalnya pembunuhan, perkosaan, perampokan, dan penyerangan. Pelaku menggunakannya sebagai *Part Time-Carreer* dan seringkali untuk menambah penghasilan dari kejahatan. Perbuatan ini berkaitan dengan tujuan-tujuan sukses ekonomi, akan tetapi dalam hal ini terdapat reaksi dari masyarakat karena nilai pemilikan pribadi telah dilanggar.

## **D. Kejahatan Transnasional**

Kejahatan Transnasional adalah kejahatan yang tidak hanya sifatnya lintas batas negara, tetapi termasuk juga kejahatan yang dilakukan di suatu negara, tetapi berakibat fatal bagi negara lain. Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai kejahatan apabila terdapat piranti hukum yang dilanggar sehingga bisa saja terjadi suatu perbuatan yang dirumuskan, dirancang, disiapkan, dilaksanakan dalam suatu negara bisa saja bukan merupakan kejahatan namun ketika hasil kejahatan yang diatur, disiapkan melakukan lintas batas negara untuk masuk ke yuridiksi negara yang berbeda.

## **E. Jumlah Tindak Kejahatan yang Dilaporkan (*Crime Total*)**

Jumlah tindak kejahatan yang dilaporkan (*Crime Total*) adalah jumlah peristiwa yang dilaporkan, yaitu setiap peristiwa yang diterima kepolisian dari laporan masyarakat, atau peristiwa yang pelakunya tertangkap tangan oleh polisi. Indikator ini memberikan gambaran jumlah tindak pidana yang terjadi pada kurun waktu tertentu dengan tidak menutup kemungkinan masih adanya kasus yang tidak tercatat “dark number”.

#### **F. Jumlah Tindak Kejahatan yang Diselesaikan (*Crime Cleared*)**

Jumlah tindak kejahatan yang diselesaikan (*Crime Cleared*) merupakan statistik yang menggambarkan jumlah kasus penyelesaian tindak pidana oleh polisi yang terjadi pada kurun waktu tertentu.

#### **G. Resiko Penduduk Terkena Tindak Kejahatan (*Crime Rate*)**

Resiko penduduk terkena tindak kejahatan (*Crime Rate*) adalah angka yang mengindikasikan peluang penduduk berisiko terkena tindak pidana per seratus ribu penduduk. Indikator ini mengindikasikan resiko penduduk terkena tindak pidana pada suatu waktu tertentu. Perbandingan antar waktu menunjukkan perkembangan tingkat keamanan penduduk.

#### **H. Pelaku Tindak Kriminalitas**

Pelaku tindak kriminalitas adalah orang yang melakukan, turut/menyuruh melakukan; membujuk orang lain dan membantu melakukan tindak kriminalitas. Klasifikasi pelaku tindak kriminalitas menurut umur (KUHP);

Anak-anak adalah orang yang berumur kurang dari 16 tahun.

Dewasa adalah orang yang berumur 16 tahun dan lebih. □ Umum adalah anak-anak dan dewasa.

#### **I. Tahanan**

Tahanan adalah tersangka pelaku tindak kejahatan/pelanggaran yang ditahan oleh pihak kepolisian sebelum diteruskan kepada kejaksaan atau masih dalam proses pengusutan lebih lanjut. Lamanya ditahan tidak melebihi 20 hari.

#### **J. Kerugian**

Kerugian adalah hilang, rusak atau musnahnya harta benda yang ditimbulkan akibat dari suatu peristiwa kejahatan/pelanggaran dan tidak termasuk korban jiwa atau badan.

## **K. Korban Kejahatan**

Korban kejahatan adalah seseorang atau harta bendanya yang ditimbulkan akibat dari suatu peristiwa kejahatan/pelanggaran dan tidak termasuk korban jiwa atau badan.

## **L. Konflik Massal dalam Podes**

Konflik massal dalam Podes merujuk pada konflik berupa perkelahian massal yang terjadi dalam satu wilayah desa/kelurahan meliputi;

Perkelahian antar kelompok warga adalah perkelahian antara kelompok warga dengan kelompok warga yang lain dalam satu desa/kelurahan/nagari.

- ✓ Perkelahian warga antar desa/kelurahan adalah perkelahian antara warga desa/kelurahan/nagari dengan warga desa/kelurahan/nagari lainnya.
- ✓ Perkelahian warga dengan aparat keamanan adalah perkelahian antara warga desa/kelurahan/nagari dengan aparat keamanan.
- ✓ Perkelahian warga dengan aparat pemerintah adalah perkelahian antara warga desa/kelurahan/nagari dengan aparat pemerintah.
- ✓ Perkelahian antar pelajar/mahasiswa adalah perkelahian antar pelajar suatu sekolah dengan pelajar sekolah lain.
- ✓ Perkelahian antar suku/etnis adalah perkelahian antar suku/etnis yang terjadi di desa/kelurahan/nagari.
- ✓ Lainnya: Perkelahian antar warga dengan pelajar/mahasiswa, perkelahian antar agama, perkelahian antar aparat keamanan, dan sebagainya.

## **M. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga legislatif yang mewakili rakyat di tingkat provinsi atau Kabupaten/Kota, memiliki fungsi legislasi (membuat peraturan daerah), penyusunan anggaran, dan pengawasan kerja pemerintah daerah.

## **N. Komisi Pemilihan Umum (KPU)**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah penyelenggara pemilihan umum di Indonesia yang memiliki struktur berjenjang di tingkat pusat, provinsi, dan Kabupaten/Kota.

### **O. Partai Politik**

Partai Politik adalah organisasi penyalur keterlibatan warganegara dalam mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik atau perebutan kekuasaan dan jabatan publik.

### **P. Pemilihan Umum**

Pemilihan Umum selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU No. 8/2012).

### **Q. Peserta Pemilu Legislatif**

Peserta pemilu legislatif adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD (UU No.10/2008).



# GAMBARAN UMUM KRIMINALITAS

3

<http://lampung.bps.go.id>





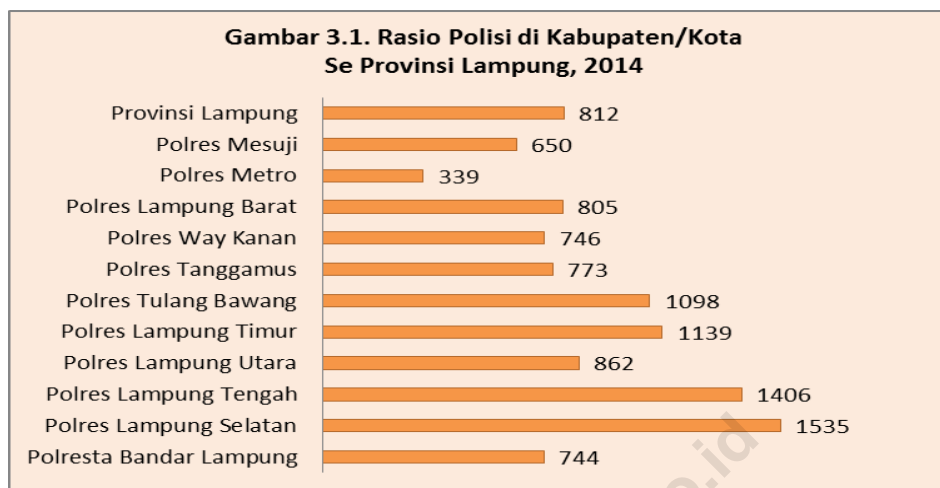
### 3.1. Sarana dan Prasarana Wilayah

Keamanan suatu wilayah tak lepas dari fasilitas keamanan yang tersedia di wilayah tersebut. Dalam upaya penanggulangan masalah keamanan di Provinsi Lampung didukung oleh berbagai prasarana keamanan antara lain 61 pos polisi, 124 polsek/polsekta, 11 polres/polresta, serta 1 polda. Sampai pada tahun 2014, Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat masih tergabung dalam wilayah hukum Polres Lampung Barat, Kabupaten Tanggamus dan Polres Pringsewu masih tergabung dalam wilayah hukum Polres Tanggamus, Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran masih tergabung dalam wilayah hukum polres Lampung Selatan, dan Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Tulang Bawang Barat masih tergabung dalam wilayah hukum Polres Tulang Bawang. Polres Mesuji menjadi polres termuda yang mulai menjadi polres definitif sejak Oktober 2013.

Polisi merupakan satuan organisasi keamanan yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Pada tahun 2014 di Provinsi Lampung rasio penduduk per polisi 812, artinya setiap 1 polisi melayani 812 penduduk. Bila dilihat per kabupaten/kota rasio penduduk per polisi terbesar berada di wilayah hukum Polres Lampung Selatan dengan rasio 1535, sedangkan rasio terkecil berada di wilayah hukum Polresta Metro yaitu 339. Dengan kata lain polisi di wilayah hukum Polres Lampung Selatan mempunyai beban pelayanan paling besar yaitu setiap seorang polisi melayani 1535 penduduk, sedangkan beban pelayanan terkecil adalah polisi di wilayah hukum polres Metro di mana setiap 1 orang polisi melayani 339 penduduk saja.

Kalau mengikuti ketentuan PBB bahwa satu orang Polisi idealnya melayani 350 penduduk maka hanya wilayah hukum Polres Metro yang memenuhi ketentuan tersebut dengan rasio polisi terhadap penduduk Polres Metro 1 polisi untuk 339 penduduk, secara umum rasio penduduk per polisi di Provinsi Lampung sangat jauh dari ideal.

**Gambar 3.1. Rasio Polisi di Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung, 2014**



Polisi di Provinsi Lampung mayoritas berjenis kelamin laki-laki. Perbandingan polisi perempuan dengan laki-laki mencapai 1:26. Ini disebabkan karena masih rendahnya minat perempuan untuk bekerja di pelayanan masyarakat bidang keamanan.

**Tabel 3.1 Jumlah Personil Polisi di Polres/Polresta dan Polda Provinsi Lampung 2014**

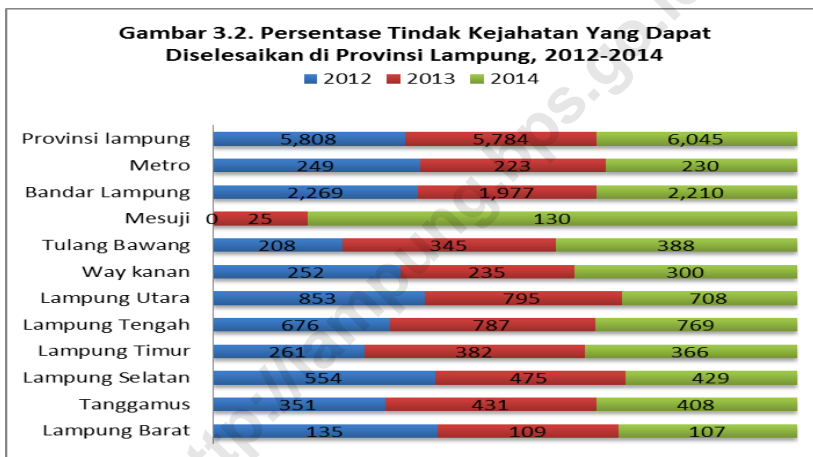
Polres/Polresta	Jumlah Polisi		
	Laki-laki	Perempuan	Total
(2)	(3)	(4)	(5)
Polresta Bandar Lampung	1,232	60	1292
Polres Lampung Selatan	857	44	901
Polres Lampung Tengah	825	48	873
Polres Lampung Utara	670	29	699
Polres Lampung Timur	865	12	877
Polres Tulang Bawang	597	28	625
Polres Tanggamus	698	36	734
Polres Way Kanan	551	23	574
Polres Lampung Barat	526	19	545
Polres Metro	433	27	460
Polres Mesuji	293	6	299
Polda Lampung	1978	31	2009
	9,525	363	9888

Sumber : Polda Lampung

### 3.2. Perkembangan Tindak Kejahatan di Provinsi Lampung

Tindak kejahatan yang dilaporkan ke polisi di Provinsi Lampung selama 3 tahun terakhir cenderung fluktuatif, tahun 2012 ke tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 12

persen. Sedangkan dari tahun 2013 ke tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 0,42 persen. Bila dilihat menurut kabupaten/kota tindak kejahatan yang dilaporkan pada tahun 2014 terbanyak terjadi di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung, yakni sebesar 3067 kasus, disusul di wilayah hukum Polres Lampung Utara (1100 kasus) dan wilayah hukum Polres Lampung tengah (937 kasus). Kondisi ini cenderung tidak berbeda dengan tahun sebelumnya. Selama periode tahun 2012-2013 tercatat tiga kabupaten/kota dengan jumlah tindak kejahatan terbanyak masing-masing adalah wilayah hukum Polresta Bandar Lampung, wilayah hukum Polres Lampung Utara, dan wilayah hukum Polres Lampung Tengah



Dari tindak kejahatan yang dilaporkan ke polisi pada tahun 2014 sebesar 30,07 persen dapat diselesaikan, mengalami penurunan bila dibanding tahun 2013 yang mencapai 33,10 persen. Bila dibandingkan dengan tahun 2013, persentase tindak kejahatan yang dapat diselesaikan di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung dan wilayah Polres Mesuji pada tahun 2014 mengalami kenaikan ( 2,33 persen dan 1,05 persen), sedangkan enam kabupaten lainnya mengalami penurunan persentase yang bervariasi, tiga kabupaten yang mengalami penurunan cukup besar yaitu yaitu wilayah hukum Polres Lampung Utara, wilayah hukum Polres Lampung Selatan, dan wilayah hukum Polres Tanggamus.

Setiap penduduk memiliki resiko terkena tindak kejahatan. Semakin besar resiko yang dimiliki masyarakat menggambarkan semakin tidak amannya suatu wilayah. Bila dibandingkan dengan tahun 2014, resiko penduduk terkena tindak kejahatan tahun

2014 meningkat di wilayah hukum polres Mesuji, wilayah hukum polres Lampung Utara, dan wilayah polres hukum Metro sedang tiga kabupaten yang menurun resiko terkena tindak kejahatannya adalah wilayah hukum polres Tanggamus, Lampung Barat dan Lampung Timur.

### 3.3 Persentase Desa/kelurahan yang Ada Tindak Kejahatan.

Menurut hasil Podes 2014, 61,59 persen desa/kelurahan di Provinsi Lampung terdapat kejadian tindak kejahatan pencurian, 14,93 persen kejadian tindak kejahatan perjudian, dan 10,79 persen ada kejadian tindak kejahatan penipuan/penggelapan.

Perhatian pemerintah maupun masyarakat perlu ditingkatkan, karena di Provinsi Lampung terdapat 7,07 persen desa/kelurahan ada kejadian tindak kejahatan “penyalahgunaan/pengedaran narkoba”. Seperti fenomena gunung es, tindak penyalahgunaan/pengedaran narkoba patut diwaspadai karena sangat dimungkinkan kejadian yang terjadi jauh lebih besar dari yang dilaporkan. Jika diamati berdasarkan jenis kejahatan, Kabupaten Lampung Tengah memiliki jumlah desa terbanyak dengan berbagai jenis tindak kejahatan dibanding kabupaten/kota lain yaitu sebanyak 86,64 persen disusul dengan Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Lampung Utara masing-masing 82,64 persen dan 69,64 persen desa/kelurahan.



Gambar 3.3. menunjukkan bahwa jumlah tindak kejahatan terhadap hak milik pada tahun 2014 di Provinsi Lampung tercatat sebesar 2160 kasus. Tiga jenis tindak

kejahatan dengan persentase terbesar masing-masing adalah kasus pencurian (61,59%), penipuan/perbuatan curang (10,79%), dan kasus pencurian dengan kekerasan (9,69%). Sementara itu pada tahun 2014 jumlah tindak kejahatan terhadap fisik manusia di Provinsi Lampung terdapat 289 kasus. Jenis tindak kejahatan penganiayaan ringan paling mendominasi tindak kejahatan terhadap fisik manusia yaitu mencapai 69,55 persen. Bila dilihat menurut Kabupaten/Kota, lebih dari 54,48 persen tindak kejahatan fisik manusia terjadi di wilayah hukum Polres Tanggamus. Sementara 45,52 persen sisanya tindak kejahatan fisik manusia terjadi di empat kabupaten/kota lainnya di Provinsi Lampung.

Dari beberapa jenis kejahatan yang terjadi selama periode tahun 2014 di berbagai wilayah di Provinsi Lampung, salah satu jenis kejahatan yang mendapat perhatian khusus adalah kejadian kejahatan narkoba. Seperti yang disajikan pada gambar 3.3, kejadian kejahatan narkoba telah merambah di berbagai kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Tahun 2014, di Provinsi Lampung terdapat 179 kasus tindak kejahatan penyalahgunaan narkoba. Jenis tindak kejahatan penyalahgunaan narkoba pada tahun 2014 terbanyak ditangani oleh Polda Provinsi Lampung sejumlah 117 kasus.

Pada tabel 22 tampak bahwa selama periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, terdapat 3 jenis kejahatan yang selalu menonjol di Provinsi Lampung yaitu pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, serta pencurian dengan kekerasan. Persentase jumlah kejahatan tahun 2014 untuk ketiga jenis tindak kejahatan tersebut di atas 78 persen dari total kejahatan.

Hal lain yang cukup memprihatinkan adalah adanya perkelahian massal. Menurut hasil Podes 2014 di Provinsi Lampung perkelahian massal terjadi di 34 desa/kelurahan. Angka perkelahian massal tertinggi pada jenis perkelahian pada kelompok masyarakat antar Desa /Kelurahan yaitu sebanyak 20 kejadian, dan 11 kejadian perkelahian antar kelompok namun masih dalam satu desa/kelurahan sementara itu perkelahian antar suku atau etnis hanya satu kejadian saja, namun seperti diketahui walau hanya terjadi satu kejadian saja namun berdampak cukup luas.

Wilayah hukum polres Lampung Selatan menjadi kabupaten yang cukup banyak desa/kelurahannya terjadi perkelahian massal yaitu terjadi di 15 desa/kelurahan, dikuti

wilayah hukum polres Lampung Tengah (10 ) dan Kabupaten Lampung Timur sebanyak 6 desa/kelurahan.

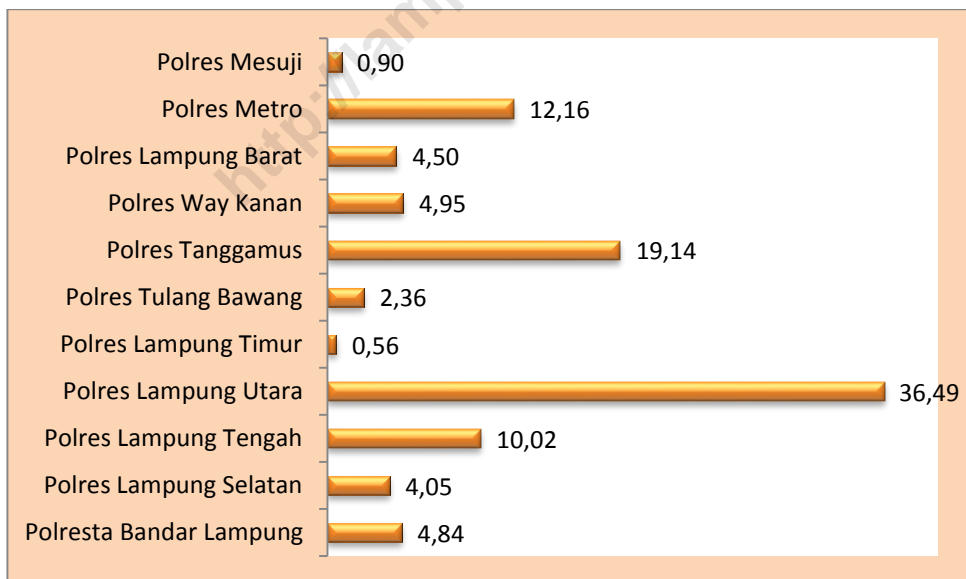
Bila dilihat menurut penggolongan kejahatan, sejak tahun 2013 sampai dengan 2014 kasus kejahatan yang menonjol di Provinsi Lampung adalah kejahatan konvensional. Namun demikian, persentase tindak kejahatan konvensional selama periode 2013 sampai dengan 2014 menunjukkan penurunan. Pada tahun 2013 kejahatan konvensional mencapai 98,86 persen, tahun 2014 turun menjadi 95,71 persen. Golongan kejahatan terbanyak kedua adalah Kejahatan Trans Nasional, golongan kejahatan ini pada tahun 2013 tidak ada dan pada tahun 2014 terjadi sebanyak 178 kasus, hal lain yang patut di apresiasi adalah terjadinya penurunan kasus kejahatan dari golongan kejahatan kekayaan negara dari 60 kasus di tahun 2013 menjadi tinggal 19 kasus di tahun 2014.

### 3.4 Pelaku Tindak Kejahatan dan Upaya Menjaga Keamanan

Selain informasi perkembangan jumlah kejahatan menurut jenis kejahatan yang terjadi di masyarakat setiap tahun secara berkesinambungan, penanganan kejahatan juga perlu memperhatikan secara serius tentang pelaku tindak kejahatan. Pelaku tindak kejahatan pada tahun 2014 sebanyak 9.423 orang. Tercatat 0,09 persen pelaku kejahatan dilakukan oleh anak-anak, 35 pelaku anak (3,94%) di antaranya berjenis kelamin perempuan. Sebanyak 36,49 persen pelaku tindak kejahatan oleh anak-anak pada tahun 2014 berasal dari wilayah hukum Polres Lampung Utara, sementara dari wilayah hukum Polres Tanggamus tercatat 19,14 persen.

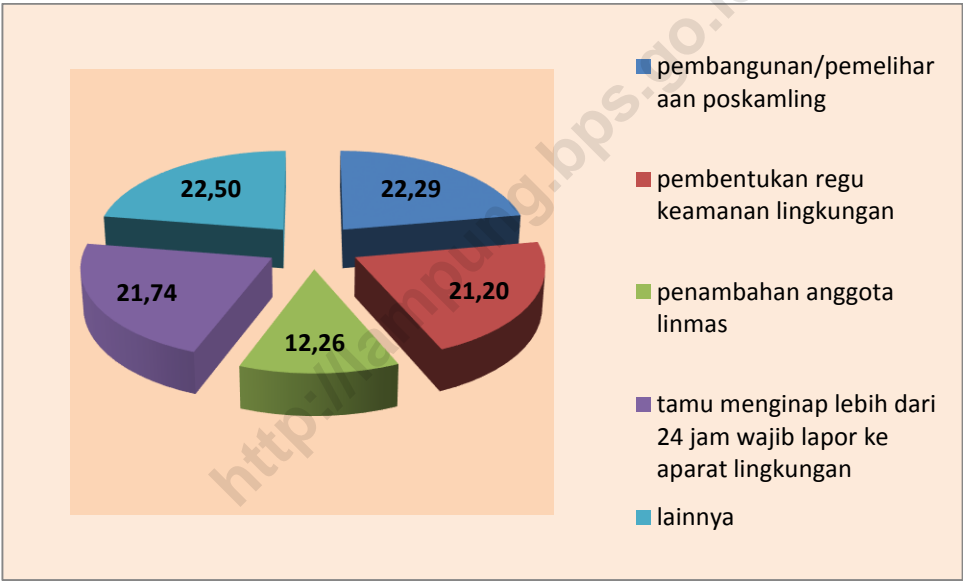
Secara umum pelaku tindak kejahatan sebagian besar berasal dari wilayah hukum Polres Lampung Selatan (15,49%). Disusul secara berurutan pelaku dari wilayah hukum Polres Tanggamus (15,40%), dan wilayah hukum Polres Lampung Utara sebesar 14,71 persen.

Gambar 3.4 Persentase Pelaku Tindak Kejahatan Oleh Anak-Anak dari Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2014



Sumber : Polda Lampung

Berbagai cara telah dilakukan warga untuk menjaga keamanan, antara lain membangun poskamling, membentuk regu keamanan lingkungan, memeriksa setiap warga dari luar desa, dan menambah jumlah anggota hansip/linmas. Menurut hasil Podes 2014, desa/kelurahan yang menjaga keamanan warga dengan cara membangun /memelihara poskamling 22,29 persen, menerapkan ketentuan pelaporan tamu yang menginap lebih dari 24 jam ke aparat lingkungan 21,74 persen, membentuk/pengaturan regu keamanan lingkungan 21,20 persen, menambah jumlah anggota hansip/linmas 12,26 persen, dan menggunakan cara-cara lainnya sebanyak 22,50 persen.





# GAMBARAN UMUM POLITIK

4

<http://lampung.bps.go.id>



## 4.1 Lembaga Politik

Demokrasi memungkinkan perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan antar individu, kelompok, individu dengan kelompok, individu dan pemerintah, kelompok dan pemerintah, bahkan antar lembaga-lembaga pemerintah. Dalam demokrasi terdapat distribusi kekuasaan yang tidak terpusat hanya pada pemerintah, sehingga memungkinkan persaingan dan saling kontrol antara satu kelompok dengan kelompok lain, antara lembaga pemerintah yang satu dengan lembaga pemerintah yang lain (legislatif, eksekutif, dan yudikatif), dan antara kelompok sosial dan lembaga pemerintah (Surbakti, 2008: 290-291).

Dalam konsepsi tersebut peran politis rakyat di luar pemerintah dijamin dan merupakan bagian penting dalam esensi demokrasi. Demokrasi bahkan disimpulkan dengan konsep "rakyat memerintah sendiri," artinya para warga negara tidak hanya menerima atau menolak hasil-hasil keputusan pemilihan umum, melainkan juga melakukan kontrol atas keputusan-keputusan pemerintahan yang terbentuk dari pemilihan umum tersebut. Penilaian terhadap proses demokrasi menjadi kebutuhan dan tidak bisa dilihat hanya sekedar dari keikutsertaan dalam pemilihan umum. Proses antar pemilihan umum yang satu dengan yang lain juga dilihat sebagai proses-proses demokratis, karena di antara kedua pemilihan umum dapat terjadi berbagai hal yang menghasilkan kesenjangan antara keputusan-keputusan pemilihan umum dengan keputusan konkret pemerintah. Pada proses tersebut warga negara memiliki kemungkinan untuk mengungkapkan pendapat-pendapat mereka secara publik dan mempersoalkan segala tema yang relevan untuk masyarakat supaya suara-suara yang sensitif terhadap masalah ini dikelola oleh sistem politik yang ada (Hardiman, 2009: 127-133).

Pada titik ini peran lembaga-lembaga yang merepresentasi kepentingan politik beragam kelompok menjadi salah satu kunci keberhasilan demokrasi. Lembaga tersebut bisa merupakan lembaga yang berada di dalam pemerintahan melalui jalur-jalur politik formal. Pada kondisi jalur politik formal terhambat, aspirasi bisa disampaikan melalui perantara lembaga di luar pemerintahan. Warga akan menyampaikan atau mengartikulasikan kepentingan mereka kepada badan-badan politik dan pemerintahan melalui kelompok-kelompok yang mereka bentuk bersama orang-orang lain yang memiliki kepentingan yang sama (Almond, 1974 dalam Mas'ood & MacAndrews, 2008: 65). Kelompok atau lembaga-lembaga itu yang akan berperan menjembatani kepentingan warga atau kelompoknya dengan pemerintah melalui berbagai mekanisme.

#### 4.1.1. Partai Politik

Demokrasi berdiri berdasarkan logika persamaan dan gagasan bahwa pemerintahan memerlukan persetujuan dari yang diperintah. Persetujuan memerlukan perwakilan yang hanya dapat diperoleh melalui pemilihan umum. Gagasan tersebut yang menjadi fondasi bagi perkembangan demokrasi. Dalam demokrasi perwakilan, fungsi pemerintahan dialihkan dari warga negara kepada organ-organ negara (Dahl, 1999 dalam Safa'at, 2011: 6-7). Organ-organ negara tersebut diperoleh melalui hasil-hasil pemilihan umum yang diikuti partai politik, sehingga peran partai politik sangat krusial. Partai politik menjadi pangkal dari sebuah pemerintahan dan kebijakan-kebijakan yang akan dihasilkan di masa depan. Oleh Carl Friedrich partai politik didefinisikan sebagai kelompok manusia yang terorganisasi secara stabil dengan tujuan untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan bagi pemimpin materiil dan idil kepada para anggotanya (Surbakti, 2010:148).

Partai politik memiliki beberapa fungsi, di antaranya yang disebutkan Almond dan Powell sebagai; rekrutmen politik, sosialisasi politik, serta artikulasi dan agregasi kepentingan (Safa'at, 2011: 66). Terkait dengan itu jumlah partai politik dalam sebuah negara akan sangat berpengaruh pada peran parpol di sebuah negara. Dilihat dari jumlahnya, sistem kepartaian dapat digolongkan dalam tiga bentuk, sistem partai tunggal, dua partai dan bersaing, dan sistem banyak partai. Indonesia sendiri memiliki sistem kepartaian banyak partai. Sistem ini dicirikan dengan sistem yang terdiri atas lebih dari dua partai yang dominan. Sistem ini merupakan produk dari struktur masyarakat yang majemuk, baik secara kultural maupun secara sosial ekonomi. Setiap golongan dalam masyarakat cenderung memelihara keterikatan dengan asal-usul budayanya dan memperjuangkan kepentingan melalui wadah politik tersendiri (Surbakti, 2010: 161). Sistem multipartai biasanya diperkuat dengan sistem perwakilan berimbang (*proportional representation*) yang memberikan kesempatan luas bagi partai-partai kecil (Safa'at, 2011: 62).

Di Provinsi Lampung, pada pemilu 2009 diikuti 44 partai hanya 11 partai yang mampu mendudukan wakilnya di tingkat DPR Provinsi, sedangkan pada pemilu 2014 diikuti oleh 12 partai peserta pemilu dah hanya 10 partai yang mempunyai keterwakilan di DPR Provinsi Lampung.

Tabel berikut memperlihatkan jumlah anggota DPR Provinsi dari tahun 2012-2014 hasil dari dua pemilu yaitu pemilu 2009 dan pemilu 2014.

**Tabel 4.1 Jumlah Anggota DPRD Provinsi Lampung menurut Asal Partai dan Jenis Kelamin, 2012**

Asal Partai Politik	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
(2)	(3)	(4)	(5)
Partai Demokrat	12	2	14
Golongan Karya	9	1	10
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	9	2	11
Partai Amanat Nasional	6	1	7
Partai Keadilan Sejahtera	6	1	7
Partai Kebangkitan Bangsa	5	0	5
Partai Gerakan Indonesia Raya	4	2	6
Partai Hati Nurani Rakyat	4	2	6
Partai Karya Peduli Bangsa	3	1	4
Partai Persatuan Pembangunan	2	1	3
Partai Demokrasi Kebangsaan	0	2	2
<b>Jumlah</b>	<b>60</b>	<b>15</b>	<b>75</b>

**Tabel 4.2 Jumlah Anggota DPRD Provinsi Lampung menurut Asal Partai dan Jenis Kelamin, 2014**

Asal Partai Politik	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
(2)	(3)	(4)	(5)
Partai Demokrat	12	2	14
Golongan Karya	8	1	9
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	9	2	11
Partai Amanat Nasional	6	1	7
Partai Keadilan Sejahtera	6	1	7
Partai Kebangkitan Bangsa	5	0	5
Partai Gerakan Indonesia Raya	4	2	6
Partai Hati Nurani Rakyat	4	2	6
Partai Karya Peduli Bangsa	3	1	4
Partai Persatuan Pembangunan	2	1	3
Partai Demokrasi Kebangsaan	0	2	2
<b>Jumlah</b>	<b>59</b>	<b>15</b>	<b>74</b>

*disebabkan meninggal dunia, anggota atas nama Bapak Sumadi dari partai Golkar*

**Tabel 4.3 Jumlah Anggota DPRD Provinsi Lampung menurut Asal Partai dan Jenis Kelamin, 2014**

Asal Partai Politik	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan</b>	<b>14</b>	<b>3</b>	<b>17</b>
<b>Partai Golongan Karya</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>10</b>
<b>Partai Kebangkitan Bangsa</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>7</b>
<b>Partai Keadilan Sejahtera</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
<b>Partai Demokrat</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
<b>Partai Amanat Nasional</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>8</b>
<b>Partai Gerindra</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>10</b>
<b>Partai Hanura</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>Partai Persatuan Pembangunan</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
<b>Partai Nasional Demokrat</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>
<b>J u m l a h</b>	<b>73</b>	<b>12</b>	<b>85</b>

#### 4.1.2. Dewan Perwakilan Rakyat

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga yang memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

Komposisi perempuan setiap fraksi di DPRD Provinsi Lampung dan jumlah perempuan pada setiap periode terus berubah setiap periode. Hasil pemilu 2014 terpilih sebanyak 12 orang perempuan atau sekitar 14,12% dari 85 anggota DPR. Jumlah ini turun dari periode sebelumnya dimana terdapat 15 perempuan atau sekitar 20,27%. Berdasarkan fraksi, jumlah perempuan paling banyak dimiliki FPDJ-P dan FPartai Nasdem dengan 3 perempuan, sebaliknya FPKS, Fpartai Demokrat dan Fpartai Hanura tidak ada keterwakilan anggota DPRD Provinsi berjenis kelamin perempuan. Sekalipun demikian Partai Nasdem memiliki persentase anggota DPRD Perempuan cukup banyak dengan 37,50% .

Dari 567 anggota DPRD di Provinsi Lampung sebagian besar berumur kurang dari 50 tahun atau sekitar 80,44 persen. DPRD Kabupaten Pesawaran menjadi DPRD yang anggota dewan perwakilan rakyatnya cenderung usia muda ( dibawah 50 tahun) sekitar 93,33 persen, disusul DPRD Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Lampung Timur masing-masing 90,00 persen, ironis dengan DPRD Kota Metro yang hanya 68,00 persen berusia dibawah 50 tahun, diikuti DPRD Kabupaten Lampung Utara (71,11 %) dan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat (73,33%), umur yang cukup produktif diharapkan akan mampu melakukan

tugas-tugas sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan dan tugas-tugas lain yang diamanatkan Undang-undang.

**Tabel 4.4 Jumlah Anggota DPRD se Provinsi Lampung Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2014**

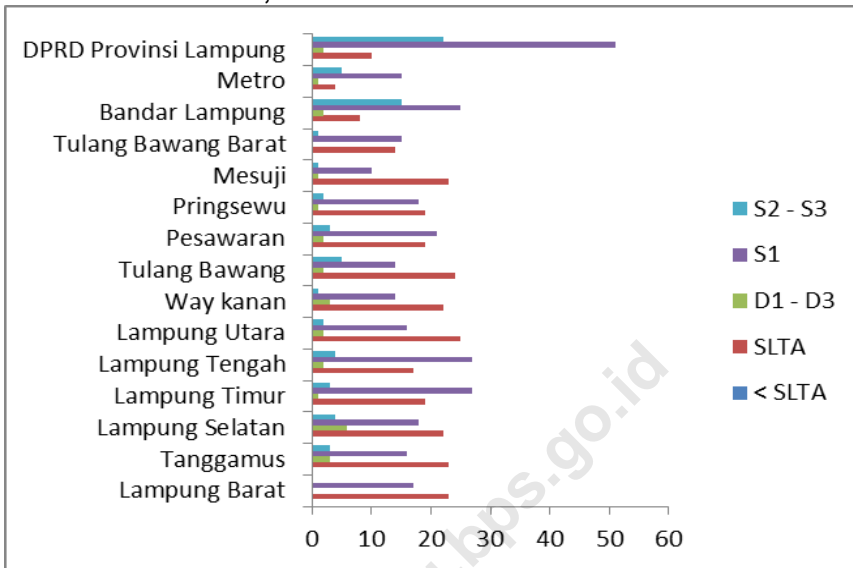
Kab/Kota	Kelompok umur							
	21 - 35		36 - 49		50 - 59		60+	
	L	P	L	P	L	P	L	P
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Lampung Barat	6	0	29	1	3	0	1	0
Tanggamus	6	2	23	6	7	1	0	0
Lampung Selatan	8	1	26	3	8	1	3	0
Lampung Timur	11	2	29	3	3	0	2	0
Lampung Tengah	5	1	36	1	7	0	0	0
Lampung Utara	9	-	21	2	8	1	4	0
Way kanan	4	1	24	5	5	0	1	0
Tulang Bawang	6	3	27	4	5	0	0	0
Pesawaran	5	2	27	8	3	0	0	0
Pringsewu	3	2	19	6	7	1	1	1
Mesuji	6	2	20	2	4	1	0	0
Tulang Bawang Barat	3	0	17	2	8	0	0	0
Pesisir Barat	0	0	0	0	0	0	0	0
Bandar Lampung	6	2	30	2	7	1	2	0
Metro	1	1	11	4	3	1	3	1
<b>DPRD Provinsi Lampung</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>44</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>3</b>

Sumber : Sekretariat Dewan

Sejalan dengan itu, sumber daya manusia dengan umur yang relatif masih muda akan sangat ideal jika ditunjang dengan kepemilikan jenjang pendidikan yang tinggi.

Anggota DPRD Kota Bandar Lampung dan DPRD Kota Metro hampir 89 persen pernah mengenyam pendidikan tinggi, baik itu pada jenjang Diploma sampai pendidikan strata S3, cukup ironis dengan keadaan di DPRD Kabupaten Mesuji yang hanya 35 persen anggotanya lulusan dari perguruan tinggi atau dengan kata lain masih terdapat sekitar 65 persen berpendidikan paling tinggi tamatan Sekolah Lanjutan Atas (SMA/K) demikian juga dengan keadaan di DPRD Lampung Timur ada sekitar (57,50 %) dan DPRD Lampung Utara (55,56%).

**Gambar 4.1 Jumlah Anggota DPRD se Provinsi Lampung menurut Jenjang Pendidikan, 2014**



#### 4.1.3. Organisasi Massa

Kecenderungan berorganisasi menjadi salah satu kebebasan dasar manusia yang diakui secara universal sebagai bagian dari hak asasi manusia. Tanpa adanya kemerdekaan berserikat, harkat kemanusiaan dapat berkurang karena dengan sendirinya seseorang tidak dapat mengekspresikan pendapat menurut keyakinan dan hati nuraninya (Safaat, 2011:4). Organisasi masyarakat merupakan kelompok yang diorganisir untuk memperjuangkan atau merepresentasi kepentingan tertentu. Suara satu orang sangat kecil pengaruhnya, terutama di negara-negara yang penduduknya berjumlah besar. Melalui organisasi diharapkan tuntutan mereka akan lebih didengar oleh pemerintah (Budiardjo, 2008:383).

Sekalipun tidak mudah membedakan antara kelompok kepentingan yang terorganisir dengan partai politik, ada satu perbedaan yang secara umum dapat diterima. Setiap organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah (pada waktu yang sama) tanpa berkehendak memperoleh jabatan publik. Sebaliknya partai politik benar-benar bertujuan untuk menguasai jabatan publik, yaitu jabatan politik maupun pemerintahan. Sekalipun demikian, kadang-kadang kelompok kepentingan itu berkembang menjadi partai politik, misalnya Partai Buruh Inggris berasal dari gerakan serikat buruh (Almond, 1974 dalam Mas'ood & MacAndrews, 2008:65-66).



kebebasan organisasi dijamin Undang-Undang. Organisasi kemasyarakatan bahkan banyak yang beraktivitas dan eksis walaupun secara legalitas tidak terdaftar di pemerintah pusat maupun daerah.

**Tabel 4.5. Jumlah Organisasi Massa Yang Terdaftar di Provinsi Lampung, 2012-2014**

Kab/Kota	Jumlah		
	2012	2013	2014
(2)	(3)	(4)	
Lampung Barat	198	129	355
Tanggamus	58	62	99
Lampung Selatan	90	195	197
Lampung Timur	146	166	225
Lampung Tengah	124	144	191
Lampung Utara	271	208	285
Way kanan	55	51	71
Tulang Bawang	59	93	89
Pesawaran	52	24	170
Pringsewu	59	116	113
Mesuji	18	24	24
Tulang Bawang Barat	17	24	24
Bandar Lampung	174	300	436
Metro	88	100	216
<b>Provinsi Lampung</b>	<b>1409</b>	<b>1636</b>	<b>2495</b>

Sumber : Kesabangpol Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung

## 4.2. Kegiatan Politik

### 4.2. 1 Pemilihan Umum

Keberadaan pemilihan umum (Pemilu) merupakan ciri paling mendasar dari sebuah negara demokrasi. Sekalipun bukan satu-satunya aspek dalam demokrasi, namun Pemilu merupakan satu bagian yang sangat penting. Dikatakan demikian karena Pemilu berperan sebagai mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan publik dan/atau mengenai sirkulasi elit secara periodik dan tertib (Surbakti *et al*, 2008:12). Mengacu pendapat tersebut, terdapat dua hal penting dalam esensi Pemilu, transfer kekuasaan secara damai

serta arah kebijakan publik, atau disebut juga sebagai pelembagaan konflik dan kepentingan (M. Asfar, dalam Aribowo *et al*, 2002:8).

Pada negara yang plural seperti Indonesia, aspirasi dan kepentingan publik sangat heterogen. Kondisi geografis yang berbentuk kepulauan juga meniscayakan realitas berupa kesenjangan kualitas hidup pada daerah-daerah yang memiliki keterbatasan akses serta jauh dari pusat kekuasaan. Kondisi tersebut secara normatif menempatkan Pemilu sebagai mekanisme yang memberikan peluang-peluang bagi konstituen untuk mengalami percepatan perbaikan kualitas hidup. Agregasi kepentingan konstituen akan diperoleh melalui proses dan mekanisme pembuatan kebijakan publik yang diwakili oleh wakil-wakil atau pemimpin hasil dari Pemilu.

Pemilihan umum memiliki tiga variabel pokok yaitu penyuaaraan (*balloting*), distrik pemilihan (*electoral distric*), dan formula pemilihan (Rae, 1967 dalam Surbakti, 2010:226). Sepanjang sejarah Pemilu di Indonesia, ketiga variabel telah mengalami berbagai perubahan, termasuk pada Pemilu terakhir yang dilakukan pada tahun 2009. Secara filosofis, perubahan sistem Pemilu di Indonesia bergerak pada semangat yang semakin terbuka dan memberikan peran yang lebih besar bagi konstituen sebagai penentu kandidat terpilih. Mekanisme ini berdampak pada keniscayaan adanya orientasi akuntabilitas politik kandidat terpilih yang lebih besar kepada publik.

Pada awalnya di Indonesia hanya dikenal satu Pemilu, yaitu Pemilu legislatif yang diselenggarakan lima tahunan. Pasca amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945, sejak tahun 2004 Indonesia mengenal Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pada tahun yang sama ditetapkan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih secara langsung oleh rakyat. Dengan demikian sejak tahun 2004, di Indonesia dikenal tiga pemilihan; Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah.

#### **4.2.2 Pemilu Legislatif 2014**

Selain proses pemilihan yang adil (*fairness of voting*) serta hak partai politik untuk mengorganisasi dan mengajukan kandidat, adanya hak pilih universal bagi pemilih (*universal adult suffrage*) merupakan tiga komponen penting untuk membangun sebuah sistem Pemilu yang kompetitif (Ozbudun, 1997:393-422 dalam Asfar, 2002:12). Hak pilih yang universal maknanya setiap warganegara memiliki hak yang sama tanpa membedakan jenis kelamin,

agama, suku, etnis, status sosial, kecuali mereka yang kehilangan haknya atas perintah undang-undang. Sekalipun terdapat regulasi yang menjamin hak pilih warga negara, bagian terpenting adalah bagaimana hak-hak politik tersebut dijamin dan dihormati pada pelaksanaan Pemilu. Jaminan hak pilih universal dalam regulasi maupun pelaksanaan merupakan tahapan paling awal dari terwujudnya integritas Pemilu (*electoral integrity*).

Pemilu bukan satu-satunya cara untuk menyalurkan partisipasi politik. Namun demikian, bentuk partisipasi politik yang paling mudah diukur melalui Pemilu, antara lain melalui perhitungan persentase orang yang menggunakan hak pilihnya dibanding dengan jumlah seluruh warga negara yang terdaftar sebagai pemilih. Pada negara-negara demokrasi, tingginya partisipasi politik masyarakat menunjukkan bahwa rakyat mengikuti dan memahami masalah politik dan bersedia melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Sebaliknya, tingkat partisipasi masyarakat yang rendah dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan. Tingginya tingkat partisipasi juga menunjukkan bahwa pemerintahan terpilih memiliki legitimasi tinggi. Pada umumnya partisipasi yang rendah juga menunjukkan legitimasi pemerintahan yang rendah pula.

**Tabel 4.6. Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu Legislatif Provinsi Lampung, 2014**

Kabupaten/Kota	Pemilu Legislatif 2014	
	Terdaftar	Menggunakan hak pilih
(1)	(2)	(3)
Lampung Barat	322288	265,264
Tanggamus	454164	338,037
Lampung Selatan	694076	516,956
Lampung Timur	779623	547,736
Lampung Tengah	903032	679,996
Lampung Utara	446687	342,597
Way kanan	333832	250,495
Tulang Bawang	287485	225,494
Pesawaran	318229	247,944
Pringsewu	311105	224,202
Mesuji	145715	113,441
Tulang Bawang Barat	200087	159,634
Bandar Lampung	651038	473,560
Metro	112519	88,992
Jumlah	<b>5,959,880</b>	<b>4,474,348</b>

Secara umum tingkat partisipasi penduduk Lampung dalam mengikuti pemilu legislatif tahun 2014 sudah diatas 70 persen, tingkat partisipasi tertinggi ada pada penduduk peserta

pemilu di Kabupaten Lampung Barat yaitu sebesar 82,31 persen, diikuti penduduk di Kabupaten Tulang Bawang Barat ( 79,78%) dan Kota Metro sebesar 79,09 persen, sementara itu tingkat partisipasi yang cukup rendah ada di Kabupaten Lampung Timur (70,26%), disusul Kabupaten Pringsewu (72,07%) dan Kota Bandar Lampung (72,74%).

**Tabel 4.7 Perolehan Suara Sah Partai Politik Dalam Pemilu Legislatif 2014 (DPRD Provinsi)**

Kabupaten/Kota	Partai Politik														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	15			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)			
Lampung Barat	11,357	21,081	13,812	81,466	23,835	18,852	29,215	19,167	7,537	7,104	2,352	7400			
Tanggamus	24,192	23,813	28,801	60,487	31,833	25,309	28,327	46,106	14,811	19,766	2,381	1595			
Lampung Selatan	26,422	29,135	44,598	80,766	56,451	64,421	73,769	44,540	15,648	20,790	8,471	4433			
Lampung Timur	52,072	52,776	49,584	89,104	43,302	69,569	53,455	69,310	22,127	12,554	3,050	2245			
Lampung Tengah	22,717	56,920	65,629	110,746	98,519	106,216	77,338	47,762	19,128	21,422	2,021	6231			
Lampung Utara	24,983	21,283	36,939	55,940	25,122	42,030	34,776	20,172	17,727	11,639	17,842	2950			
Way kanan	14,298	27,437	16,301	33,932	23,678	30,632	37,269	9,680	7,354	27,634	3,863	3319			
Tulang Bawang	14,063	12,655	23,248	55,034	21,322	29,125	17,899	10,143	10,263	8,088	1,286	548			
Pesawaran	13,326	22,596	18,726	50,621	21,354	26,155	18,212	23,198	14,185	14,159	1,777	500			
Pringsewu	9,722	14,348	17,382	40,463	43,078	21,600	14,241	24,381	11,512	6,000	663	1170			
Mesuji	35,465	5,818	4,959	16,371	8,730	11,753	8,994	8,324	1,593	1,892	672	175			
Tulang Bawang Barat	6,641	10,993	16,149	25,673	15,148	27,871	15,161	9,385	7,184	10,730	1,531	1601			
Bandar Lampung	48,075	17,757	46,610	78,888	30,050	39,353	61,844	48,521	18,436	18,471	3,996	5952			
Metro	3,463	4,904	8,528	14,339	6,804	10,424	13,652	8,669	1,857	2,247	286	196			
<b>Provinsi Lampung</b>	<b>306,796</b>	<b>321,516</b>	<b>391,266</b>	<b>793,830</b>	<b>449,226</b>	<b>523,310</b>	<b>484,152</b>	<b>389,358</b>	<b>169,362</b>	<b>182,496</b>	<b>50,191</b>	<b>38,315</b>			

Sumber : KPUD Provinsi

Keterangan :

1. Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
2. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
3. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
5. Partai Golongan Karya (Golkar)
6. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
7. Partai Demokrat
8. Partai Amanat Nasional (PAN)
9. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
14. Partai Bulan Bintang (PBB)
15. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)

PDI-Perjuangan memperoleh suara terbanyak dengan jumlah 793.830, disusul Partai Gerindra dengan 523.320 suara dan Partai Demokrat dengan 484.358 suara. Sementara yang paling sedikit diperoleh PKPI dengan 38.315 suara kemudian PBB pada urutan selanjutnya dengan 50.191 suara (Tabel 4.7).

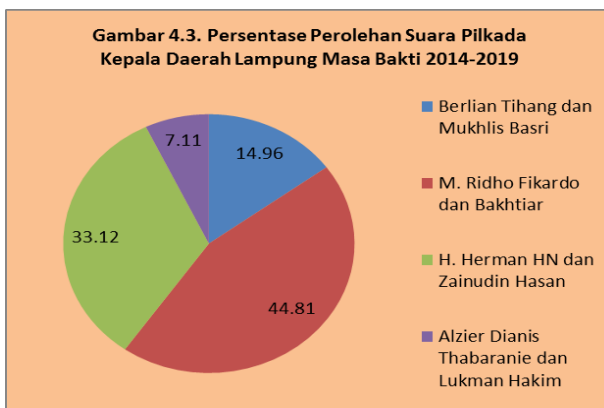
### 4.2.3 Pemilihan Kepala Daerah

Tahun 2014 menjadi tahun yang bersejarah untuk daerah Provinsi Lampung, dari 33 Provinsi se Indonesia, hanya provinsi Lampung yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah gubernur dan wakil gubernur bersamaan dengan diselenggarakannya pemilihan umum legislatif secara 9 April 2014 serentak di seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

Pemilihan gubernur dan wakil gubernur diikuti oleh empat pasang calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan masing-masing partai pengusung sbb :

NO	NAMA CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL DAERAH	PARTAI PENGUSUNG
1	Ir. H. Berlian Tihang, MM dan Drs. H. Mukhlis Basri	PDI Perjuangan (PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Pemuda Indonesia (PPI), Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)
2	Muhammad Ridho Ficardo, Sp.i, M.Si dan Bakhtiar SH,MM	Partai Demokrat,Partai Keadilan Sejahtera (PKS),Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), Partai Buruh, Partai Buruh,Partai Bulan Bintang (PBB)
3	Drs. H. Herman HM,MM dan DR Zainudin Hasan, SH,MH,MM	Partai Bulan Bintang (PBB),Partai Matahari Bangsa (PMB), Partai Karya Pembangunan (Pakar Pangan),Partai Amanat Nasional (PAN),Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN),Partai Barisan Nasional(BARNAS),PKBIB,Partai Kedaulatan,PNI Marhaenisme,Partai Demokrasi Pembaruan (PDP),Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PDDI),Partai Nasional Banteng Kemerdekaan,Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU),Partai Persatuan Nasional (PPN). Partai Persatuan Nahdatul Ummah
4	M.Alzier Dianis Thabranie, SE. dan H. Lukman Hakim,SH,MM	Partai Golongan Karya (Partai GOLKAR),Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)

Adapun hasil perolehan suara pilkada kepala daerah Lampung untuk masa bakti 2014-2019 seperti dalam gambar berikut :



Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik ini, tabel berikut akan memperlihatkan seberapa tinggi pemahaman dan kesediaan masyarakat Lampung turut berperan aktif / mempunyai perhatian kepada pemerintahan di Lampung secara khusus dan kepada masalah kenegaraan secara umumnya.

**Tabel 4.8. Jumlah Penduduk yang Terdaftar dan Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilukada**

Kab/Kota	Pemilukada Gubernur	
	Terdaftar	Menggunakan hak pilih
(2)	(3)	(4)
Lampung Barat	322,288	265,264
Tanggamus	454,164	338,037
Lampung Selatan	694,076	516,956
Lampung Timur	779,623	547,736
Lampung Tengah	903,032	679,996
Lampung Utara	446,687	342,597
Way kanan	333,832	250,495
Tulang Bawang	287,485	225,494
Pesawaran	318,229	247,944
Pringsewu	311,105	224,202
Mesuji	145,715	113,441
Tulang Bawang Barat	200,087	159,634
Pesisir Barat	-	-
Bandar Lampung	651,038	473,560
Metro	112,519	88,992
Provinsi Lampung	5,959,880	4,474,348

Secara umum tingkat partisipasi pemilukada diatas 75 persen, yang berarti pemerintahan kepala daerah terpilih mendapat legitimasi yang cukup tinggi dari masyarakat yang dipimpinnya. Dengan tingkat legitimasi yang cukup tinggi, diharapkan pembangunan di daerah Lampung pada umumnya akan berjalan dengan lancar sesuai dengan cita-cita dan harapan bersama kesejahteraan bagi semua penduduk yang berdiam di Sang Bumi Ruwai Jurai ini.

# DEMOKRASI DAN KERAGAMAN

5

<http://lampung.bps.go.id>





## 5.1 Demokrasi

Demokrasi merupakan sistem politik yang memberikan bagi keadilan dan persamaan bagi semua warga negara. Namun secara praktek di lapangan demokrasi diterapkan secara berbeda-beda. Penerapan demokrasi beragam, sering kali diterapkan secara sepihak oleh penguasa. Oleh karena itu untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan demokrasi di suatu wilayah dan terdapat keterbandingan antar wilayah diperlukan instrumen yang univarsa

Untuk mengukur pencapaiannya baik di tingkat daerah maupun pusat bukan sesuatu hal yang mudah. Pembangunan demokrasi memerlukan data empirik untuk dapat dijadikan landasan pengambilan kebijakan dan perumusan strategi yang spesifik dan akurat. Untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan demokrasi politik di Indonesia maka sejak tahun 2009, Badan Pusat Statistik (BPS) bersama stakeholder lain seperti Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (KEMENKOPOLHUKAM), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI), United Nations Development Programme (UNDP) dan Tim Ahli yaitu Prof. Maswadi Rauf (UI), Prof. Musdah Mulia (UIN Syarif Hidayatullah), Dr. Syarif Hidayat (LIPI), dan Dr. Abdul Malik Gismar (Universitas Paramadina) merumuskan pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).

IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu adalah Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga-lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*).

IDI bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat perkembangan demokrasi. Dari indeks tersebut akan terlihat perkembangan demokrasi sesuai dengan ketiga aspek yang diukur. Di samping level nasional, IDI juga dapat memberikan gambaran perkembangan demokrasi di provinsi-provinsi seluruh

Indonesia. IDI merupakan indikator yang tidak hanya melihat gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah/birokrasi saja. Namun, juga melihat perkembangan demokrasi dari aspek peran masyarakat, lembaga legislatif (DPRD), partai politik, lembaga peradilan dan penegak hukum. Oleh karena itu, perkembangan IDI merupakan tanggung jawab bersama semua *stakeholder*, tidak hanya pemerintah saja.

### Komponen Penghitungan IDI 2009 - 2014

Aspek	Variabel	Indikator *)
1. Kebebasan Sipil	1. Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	2 indikator
	2. Kebebasan Berpendapat	2 indikator
	3. Kebebasan Berkeyakinan	3 indikator
	4. Kebebasan dari Diskriminasi	3 indikator
2. Hak-Hak Politik	5. Hak Memilih dan Dipilih	5 indikator
	6. Partisipasi Politik dlm Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Pemerintahan	2 indikator
3. Institusi Demokratis	7. Pemilu yang Bebas dan Adil	2 indikator
	8. Peran DPRD	3 indikator
	9. Peran Partai Politik	2 indikator
	10. Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	2 indikator
	11. Peradilan yang Independen	2 indikator

Pengumpulan data IDI mengombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif sebagai tahapan yang saling melengkapi. Pada tahap pertama data kuantitatif dikumpulkan dari koding surat kabar dan dokumen tertulis seperti Perda atau peraturan dan surat keputusan kepala daerah, yang sesuai dengan indikator-indikator IDI. Temuan-temuan tersebut kemudian diverifikasi dan dielaborasi melalui *focus group discussion* (FGD) sebagai tahap pengumpulan data kedua, sekaligus menggali kasus-kasus yang tidak tertangkap di koding surat kabar/dokumen. Pada tahap ketiga data-data yang telah terkumpul tersebut diverifikasi melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang kompeten

memberikan informasi tentang indikator IDI. Semua tahapan pengumpulan data dilakukan oleh BPS Provinsi, diolah di BPS RI, dan diverifikasi oleh Dewan Ahli beserta mitra kerja lain pada semua tahapannya

Dari sisi penghitungan Indeks, IDI harus melalui tiga tahapan proses yakni *pertama*, menghitung indeks akhir untuk setiap indikator; *kedua*, menghitung indeks provinsi; dan *ketiga*, menghitung indeks keseluruhan atau IDI Nasional. Ketiga tahapan ini secara hierarkhis terkait satu dengan yang lain. Indeks masing-masing indikator IDI (28 indikator) di setiap provinsi memberikan kontribusi dalam penghitungan indeks 11 variabel IDI, selanjutnya indeks 11 variabel memberikan kontribusi terhadap penghitungan indeks tiga aspek IDI. Komposit indeks ketiga aspek IDI inilah yang merefleksikan indeks demokrasi di masing-masing provinsi, dan pada akhirnya komposit indeks provinsi menentukan IDI Nasional.

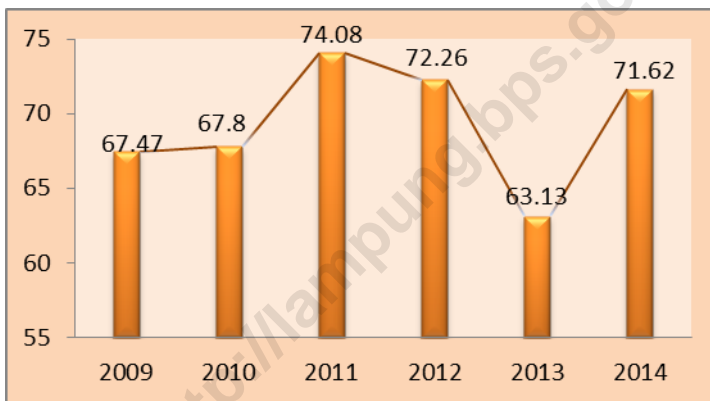
Untuk menggambarkan capaian tingkat demokrasi dalam IDI digunakan skala 0 – 100. Skala ini merupakan skala normatif di mana 0 adalah tingkat terendah dan 100 adalah tingkat tertinggi. Tingkat terendah (nilai indeks = 0) secara teoretik dapat terjadi bila semua indikator mendapatkan skor yang paling rendah (skor 0). Sebaliknya, tingkat tertinggi (nilai indeks = 100) secara teoritik dimungkinkan apabila seluruh indikator memperoleh skor tertinggi. Selanjutnya, untuk memberi makna lebih lanjut dari variasi indeks yang dihasilkan, skala 0 – 100 tersebut dibagi ke dalam tiga kategori tingkat demokrasi, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60).

Dari sisi penghitungan Indeks, IDI harus melalui tiga tahapan proses yakni *pertama*, menghitung indeks akhir untuk setiap indikator, *kedua*, menghitung indeks provinsi; dan *ketiga*, menghitung indeks keseluruhan atau IDI Nasional. Ketiga tahapan ini secara hierarkhis terkait satu dengan yang lain. Indeks masing-masing indikator IDI (28 indikator) di setiap provinsi memberikan kontribusi dalam penghitungan indeks 11 variabel IDI, selanjutnya indeks 11 variabel memberikan kontribusi terhadap penghitungan indeks tiga aspek IDI. Komposit indeks ketiga

aspek IDI inilah yang merefleksikan indeks demokrasi di masing-masing provinsi. Dan pada akhirnya komposit indeks provinsi menentukan IDI Nasional. Penghitungan IDI dilakukan pada tahun berikutnya IDI tahun 2009 diukur tahun 2010, IDI tahun 2010 diukur pada tahun 2011, dan seterusnya. Metode pengumpulan data IDI menggunakan beberapa tahap seperti koding koran, koding dokumen, FGD dan wawancara mendalam.

### 5.1.1. Perkembangan IDI Lampung

Gambar 5.1. Perkembangan IDI Lampung, 2009-2014

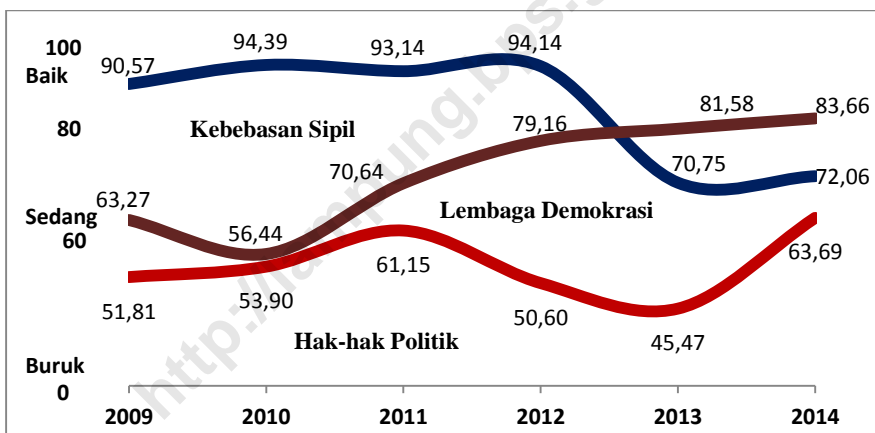


Perkembangan IDI Lampung dari 2009 hingga 2014 mengalami fluktuasi (2009 sebesar 67,47, 2010 sebesar 67,8, 2011 sebesar 74,08, 2012 sebesar 72,26, 2013 sebesar 63,13 dan 2014 sebesar 71,62). Meskipun demikian, tingkat demokrasi Lampung berdasarkan penghitungan Indeks sejak tahun 2009 hingga 2014 tetap masih berada pada kategori sedang. Hal ini menunjukkan IDI sebagai sebuah alat untuk mengukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia, memang dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi. Karena IDI disusun berdasarkan *evidence based* (kejadian) sehingga potret yang dihasilkan IDI merupakan refleksi realitas yang terjadi pada tahun yang bersangkutan.

### 5.1.2. IDI Menurut Aspek.

Angka IDI 2014 merupakan indeks komposit yang disusun dari skor beberapa aspek yakni aspek kebebasan sipil dengan nilai 70,75; aspek lembaga demokrasi sebesar 81,58, dan aspek hak-hak politik sebesar 45,47. Pada 2014 distribusi indeks dalam ketiga aspek demokrasi yang diukur terlihat aspek kebebasan sipil dan lembaga demokrasi mengalami peningkatan berturut-turut 3,39 dan 1,17 poin. Sementara nilai indeks hak-hak politik cenderung mengalami penurunan 4,87 poin.

**Gambar 5.2. Perkembangan IDI Secara Aspek**



Walaupun terjadi penurunan indeks, pola sebaran nilai di atas masih sama dengan tahun pengukuran sebelumnya, yaitu kebebasan sipil dan lembaga demokrasi secara umum terkategori “baik”, sementara aspek hak-hak Politik masih “buruk”. Dari data IDI 2014 diperoleh informasi pada aspek hak-hak politik masih terdapat penyampaian aspirasi dalam bentuk demonstrasi yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan seperti merusak, memblokir, membakar, dan melakukan penyegelan terhadap kantor-kantor pemerintah dan pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang berkurang cukup banyak.

Peran partai politik dalam demokrasi di Provinsi Lampung tahun 2014 juga cenderung naik daripada tahun sebelumnya. Salah satunya ditunjukkan oleh bertambahnya alokasi anggaran pendapatan yang disetujui dalam paripurna DPRD Provinsi Lampung tahun 2014 daripada alokasi anggaran pendidikan tahun 2013. Hal ini secara lebih jelas dapat dilihat dari angka indeks aspek peran partai politik tahun 2014 yang cenderung dari 98,06 pada tahun 2013 menjadi 99,06.

## 5.2. Keragaman

Keanekaragaman secara suku bangsa atau kebudayaan merupakan ciri utama yang menjadi ciri masyarakat majemuk (Suparlan, 2002:99).

Hasil Sensus Penduduk (SP) 2010, suku bangsa di Indonesia berjumlah 1.340 suku. Kemajemukan memiliki peran besar dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Gelombang kesadaran akan persamaan perasaan nasib tertindas, mendorong berbagai kelompok berbasis etnis melakukan perlawanan di banyak daerah. Pada tahun 1928 pemuda-pemudayang berasal dari organisasi pemuda benuansa kedaerahan dan kesukuan, atau keagamaan seperti; *Jong Java, Jong Borneo, Jong Sumatranen Bond, JongCelebes, Jong Islamiten Bond* berkumpul, bersatu dan bersumpah untuk membangun satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa: Indonesia (Zubair, 2003:112). Karena itu dalam sidang BPUPKI tahun 1945, pidato Soekarno menyerukan "...marilah kita mengambil dasar Negara jang pertama: Kebangsaan Indonesia. Kebangsaan Indonesia jang bulat! Bukan kebangsaan Djawa, bukan kebangsaan Sumatera, bukan kebangsaan Borneo, Sulawesi, Bali, atau lain-lain, tetapi kebangsaan Indonesia, jang bersama-sama menjadi dasar satu nationale staat."

Fakta tersebut menjelaskan bahwa negara ini dibangun dan diikat dengan komitmen persatuan bangsa yang memberi ruang setara bagi seluruh kelompok suku bangsa dan agama.

Demikian juga di Provinsi Lampung yang terdiri dari berbagai suku dan agama, dan ini sudah disadari oleh para leluhur penduduk Lampung hingga dicituskan semboyan "Sang Bumi Ruwai Jurai" yang berarti Sang=se=satu, Bumi=bumi, Ruwa = dua, Jurai=cabang, maknanya adalah didalam satu bumi=Lampung terdapat dua cabang yaitu pesisir dan pepadun, dalam tafsiran lain disebut dengan penduduk pendatang dan asli, dua komponen besar ini ingin disatukan dalam kalimat Sang Bumi Ruwai Jurai. Semboyan ini mendasari hidup bermasyarakat seluruh penduduk Lampung.

### 5.2.1. Keragaman Suku di Provinsi Lampung

Berdasarkan SP 2010 pada tingkat provinsi, penduduk Lampung sebagian besar suku Jawa dengan jumlah 4.856 ribu jiwa, berikutnya suku asal Lampung 1.028 ribu jiwa, dan suku asal Banten dengan 728 ribu jiwa (Tabel 5.3). Jumlah penduduk berdasarkan suku dan wilayah ditampilkan pada Tabel 5.1.

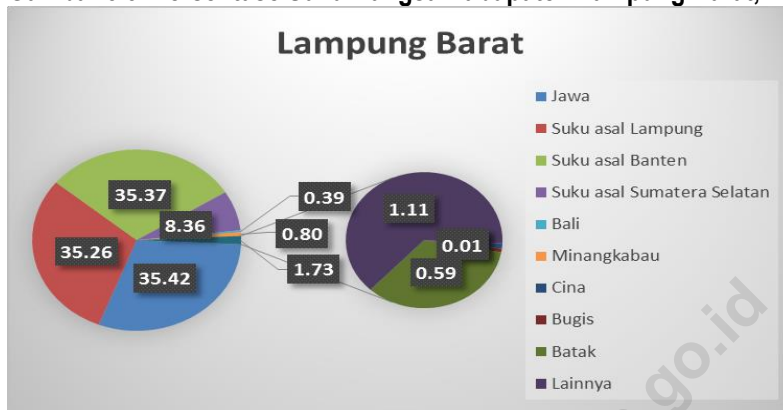
**Tabel 5.1. Persentase Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Suku Bangsa di Provinsi Lampung, 2010**

Kabupaten / Kota	Jawa	Suku asal Lampung	Suku asal Banten	Suku asal Sumatera Selatan	Bali	Minangkabau	Cina	Bugis	Batak	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1801. Lampung Barat	35.42	35.26	35.37	8.36	0.39	0.80	0.02	0.01	0.59	1.11
1802. Tanggamus	44.81	21.16	21.61	8.05	0.04	0.56	0.17	0.12	0.14	2.05
1803. Lampung Selatan	61.28	12.02	12.12	4.75	1.63	0.85	0.11	0.41	0.89	0.92
1804. Lampung Timur	81.25	8.40	8.41	0.84	1.66	0.40	0.08	0.40	0.21	0.71
1805. Lampung Tengah	81.63	6.86	6.91	1.16	3.17	0.40	0.11	0.09	0.46	0.28
1806. Lampung Utara	50.05	20.45	20.47	13.96	0.39	0.76	0.18	0.02	0.50	0.57
1807. Way Kanan	61.72	13.31	13.38	15.00	2.83	0.32	0.01	0.01	0.29	0.41
1808. Tulang Bawang	70.74	14.74	14.81	2.56	2.65	0.47	0.06	1.17	0.77	0.72
1809. Pesawaran	59.94	15.37	15.49	2.83	0.03	0.53	0.11	0.23	0.26	0.95
1810. Pringsewu	84.91	4.03	4.07	1.49	0.03	0.57	0.30	0.01	0.38	0.53
1811. Mesuji	82.19	1.12	1.14	3.25	2.28	0.16	0.01	0.30	0.61	6.97
1812. Tulang Bawang Barat	81.54	12.18	12.19	0.49	1.06	0.30	0.02	0.02	0.64	0.36
1871. Bandar Lampung	40.68	15.74	15.84	10.34	0.41	3.36	3.38	0.60	2.30	3.29
1872. Metro	72.45	9.56	9.71	4.45	0.32	3.34	2.29	0.07	0.87	1.16
Provinsi Lampung	64.06	13.47	13.56	5.49	1.38	0.92	0.53	0.28	0.69	1.21

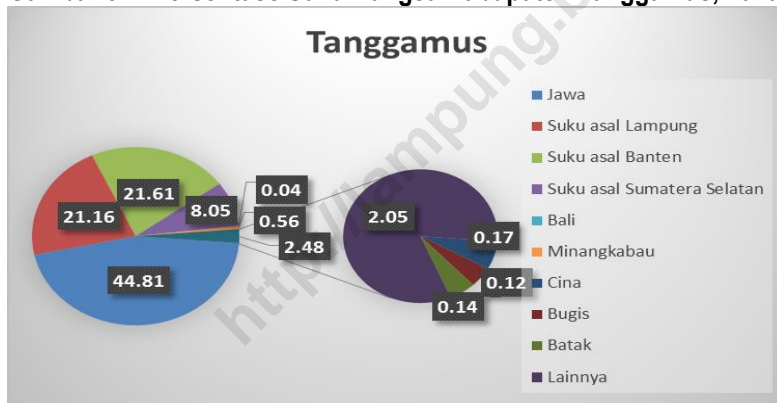
**Catatan :** Jumlah penduduk SP2010 7.608.405 jiwa tidak termasuk penduduk yang bertempat tinggal tidak tetap

Secara rinci per kabupaten/kota dapat diperhatikan pada grafik-grafik dibawah ini :

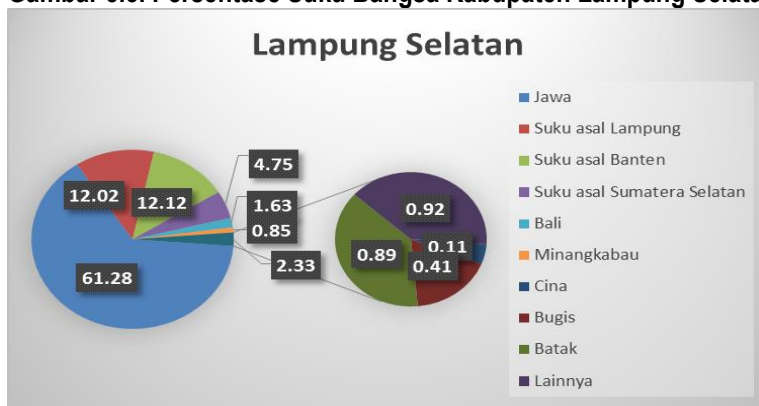
**Gambar 5.3. Persentase Suku Bangsa Kabupaten Lampung Barat, 2010**



**Gambar 5.4. Persentase Suku Bangsa Kabupaten Tanggamus, 2010**

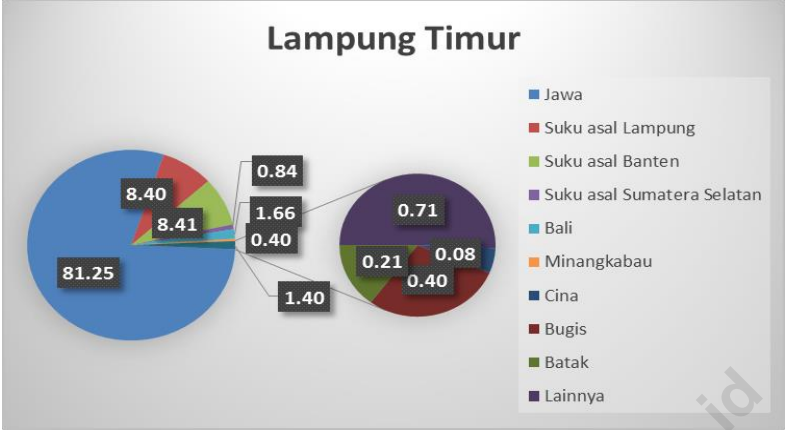


**Gambar 5.5. Persentase Suku Bangsa Kabupaten Lampung Selatan, 2010**

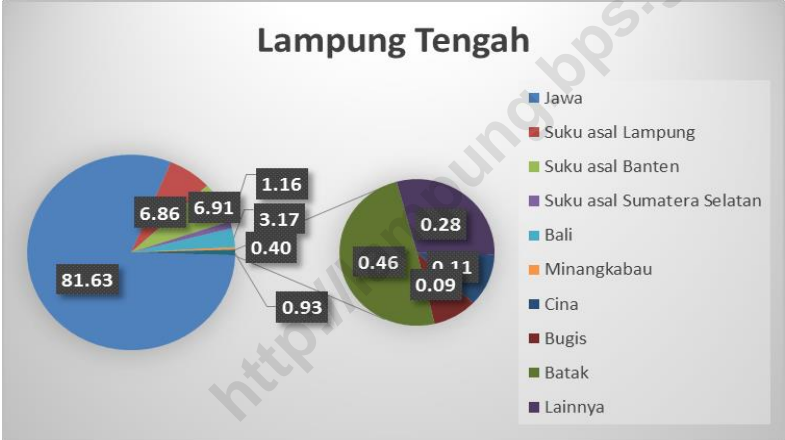




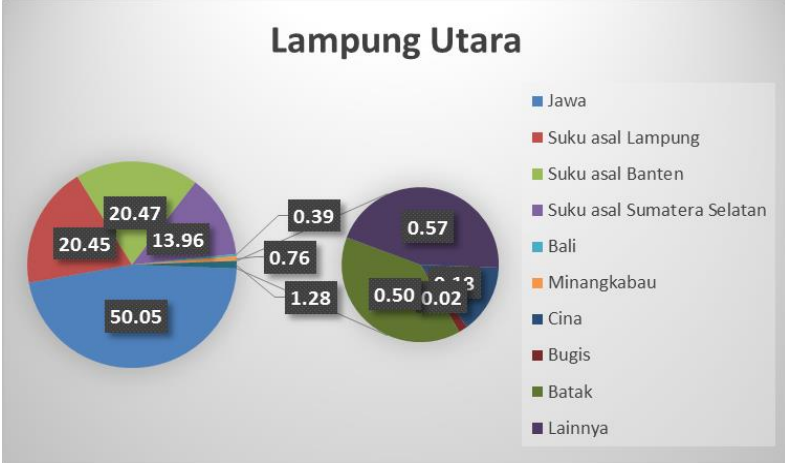
Gambar 5.6. Persentase Suku Bangsa Kabupaten Lampung Timur, 2010



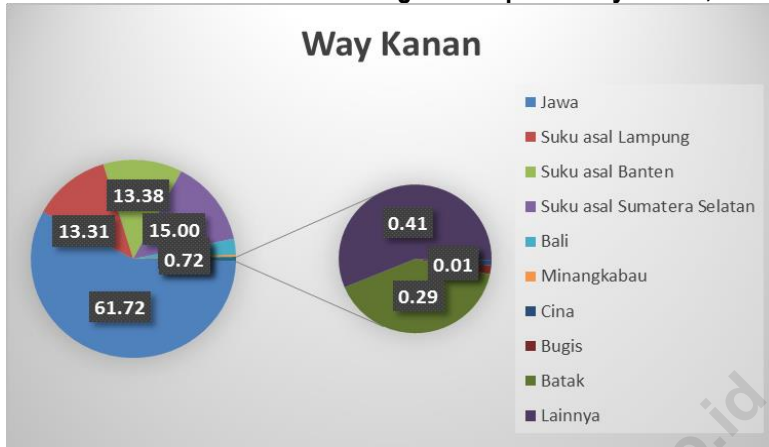
Gambar 5.7. Persentase Suku Bangsa Kabupaten Lampung Tengah, 2010



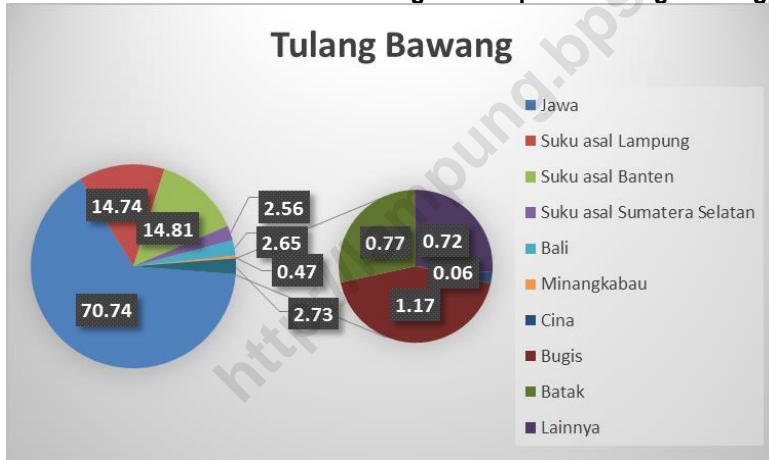
Gambar 5.8. Persentase Suku Bangsa Kabupaten Lampung Utara, 2010



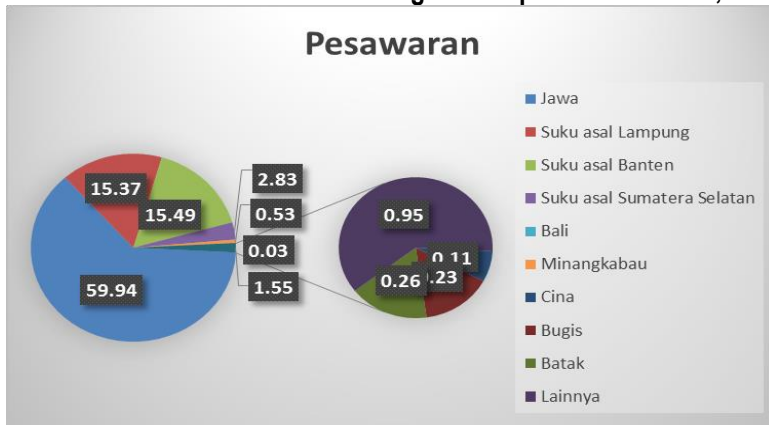
Gambar 5.9. Persentase Suku Bangsa Kabupaten Way Kanan, 2010



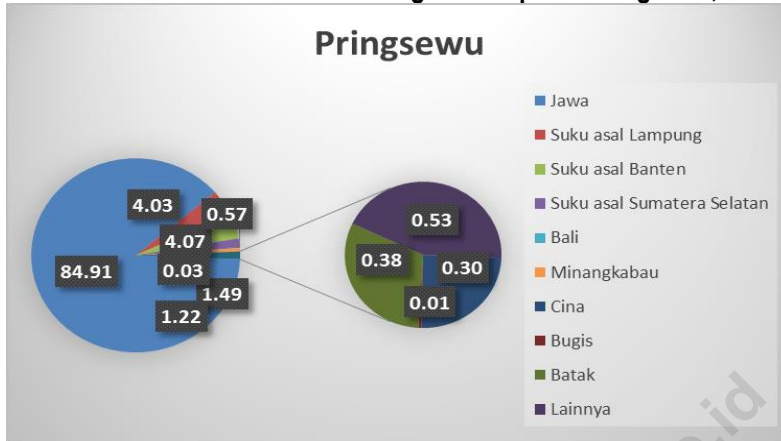
Gambar 5.10. Persentase Suku Bangsa Kabupaten Tulang Bawang, 2010



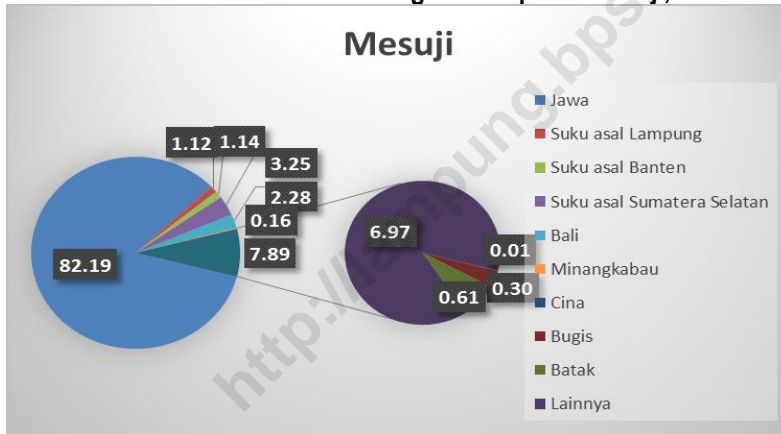
Gambar 5.11. Persentase Suku Bangsa Kabupaten Pesawaran, 2010



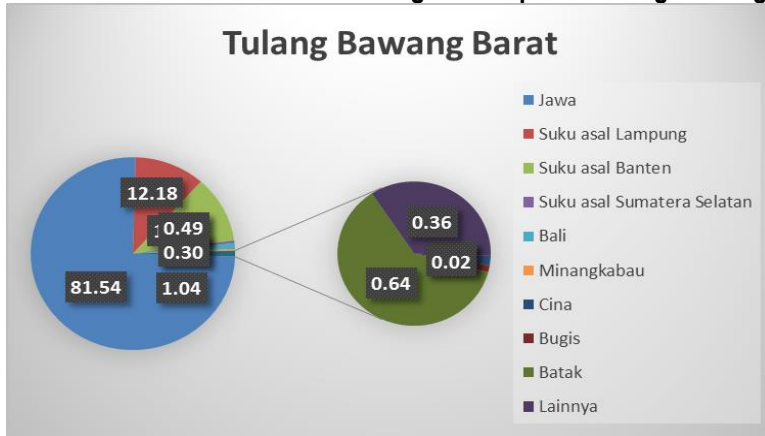
Gambar 5.12. Persentase Suku Bangsa Kabupaten Pringsewu, 2010



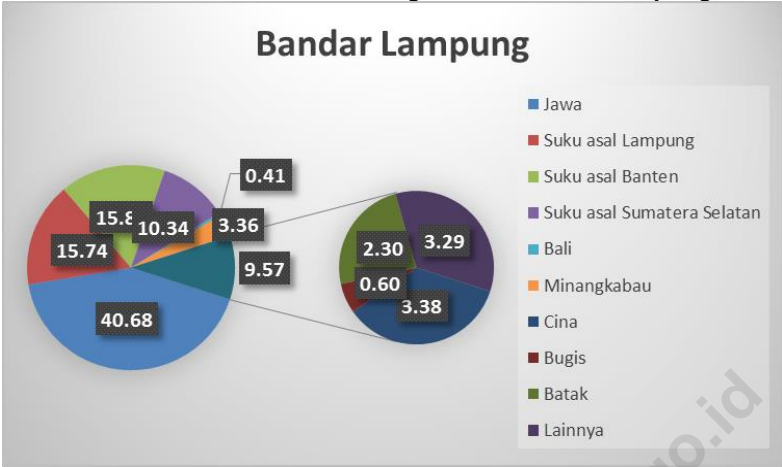
Gambar 5.13. Persentase Suku Bangsa Kabupaten Mesuji, 2010



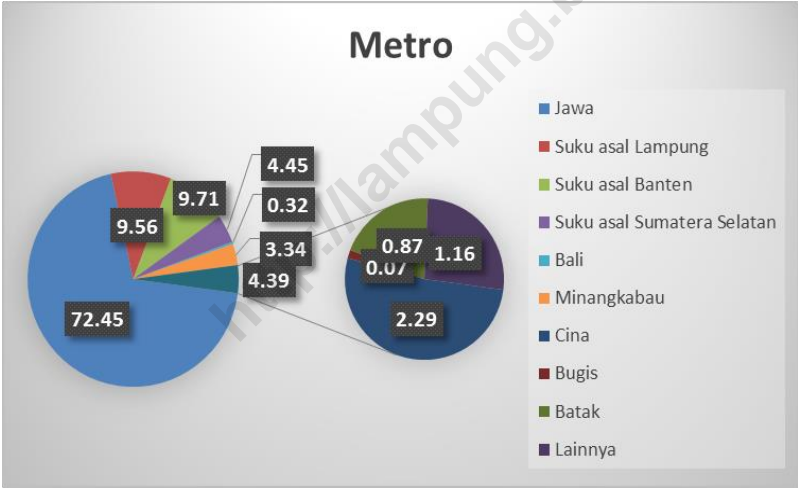
Gambar 5.14. Persentase Suku Bangsa Kabupaten Tulang Bawang Barat, 2010



Gambar 5.15. Persentase Suku Bangsa Kota Bandar Lampung, 2010



Gambar 5.16. Persentase Suku Bangsa Kota Metro, 2010



## 5.2.2. Keragaman Agama Provinsi Lampung

Berdasarkan penganut agama, mayoritas penduduk Indonesia penganut Agama Islam dengan jumlah 7.264 ribu penganut, selanjutnya Kristen dengan penganut 115 ribu penganut, dan Hindu dengan penganut 113 ribu rupiah. Informasi tentang penganut agama berdasarkan wilayah ditampilkan pada tabel 5.3

**Tabel 5.3. Persentase Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Agama di Provinsi Lampung, 2010**

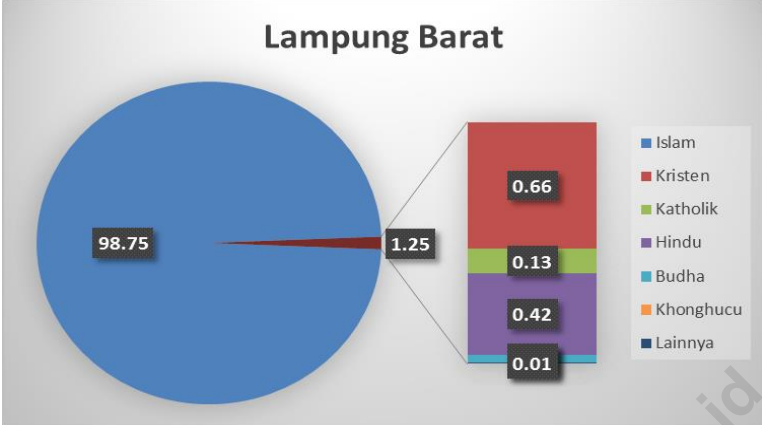
Kabupaten / Kota	Agama yang dianut						
	Islam	Kristen	Katholik	Hindu	Budha	Khonghucu	Lainnya
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1801. Lampung Barat	98.75	0.66	0.13	0.42	0.04	0.00	0.01
1802. Tanggamus	99.02	0.29	0.47	0.14	0.07	0.00	0.00
1803. Lampung Selatan	96.18	1.41	0.62	1.65	0.12	0.00	0.01
1804. Lampung Timur	96.01	1.39	0.62	1.74	0.24	0.01	0.00
1805. Lampung Tengah	93.76	1.36	1.26	3.46	0.16	0.00	0.00
1806. Lampung Utara	97.73	1.06	0.68	0.41	0.11	0.01	0.00
1807. Way Kanan	95.18	1.05	0.78	2.90	0.05	0.00	0.03
1808. Tulang Bawang	94.54	1.98	0.69	2.69	0.09	0.00	0.01
1809. Pesawaran	98.07	0.91	0.55	0.09	0.37	0.00	0.01
1810. Pringsewu	96.27	0.79	2.01	0.70	0.16	0.01	0.05
1811. Mesuji	95.61	1.39	0.35	2.54	0.10	0.00	0.01
1812. Tulang Bawang Barat	95.25	2.63	0.79	1.20	0.12	0.00	0.00
1871. Bandar Lampung	92.96	3.57	1.60	0.35	1.48	0.04	0.00
1872. Metro	93.46	2.59	2.57	0.28	1.10	0.00	0.00
Total	95.74	1.52	0.91	1.50	0.32	0.01	0.01

Sumber : BPS Provinsi Lampung

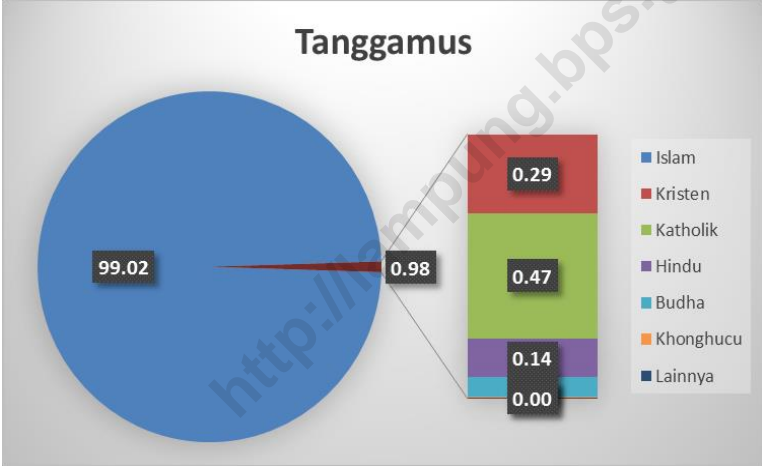
**Catatan** : Jumlah penduduk SP2010 7.608.405 jiwa tidak termasuk penduduk yang bertempat tinggal tidak tetap

Secara rinci pemeluk agama per kabupaten/kota dapat diperhatikan pada grafik-grafik dibawah ini :

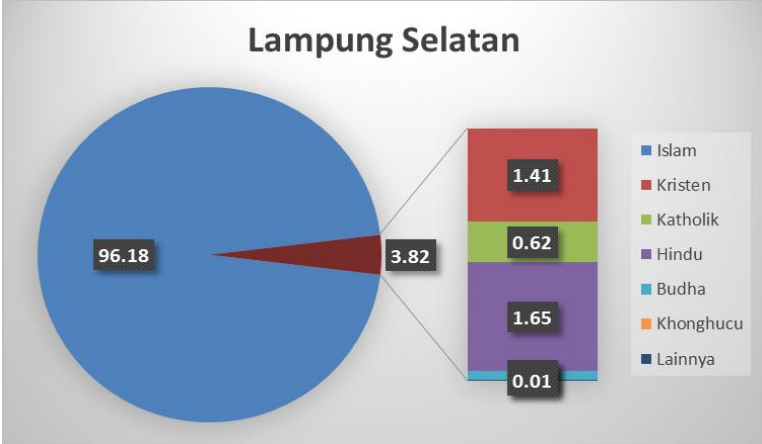
Gambar 5.17. Persentase Agama Kabupaten Lampung Barat, 2010



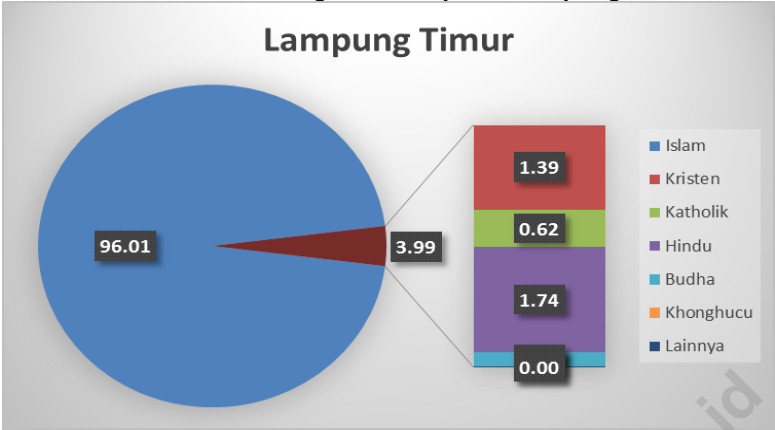
Gambar 5.18. Persentase Agama Kabupaten Tanggamus, 2010



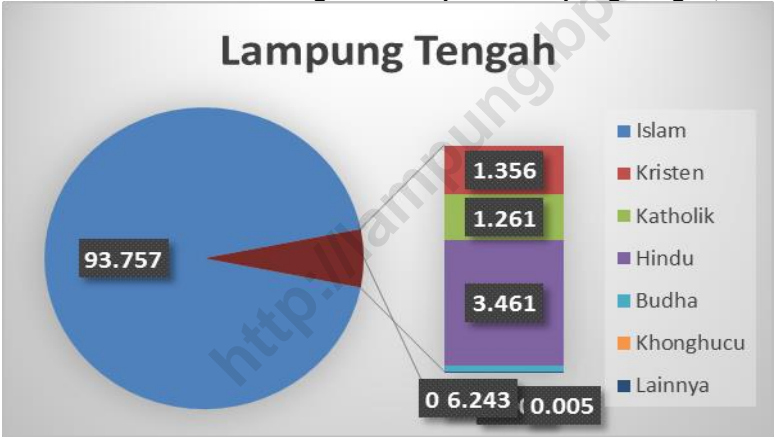
Gambar 5.19. Persentase Agama Kabupaten Lampung Selatan, 2010



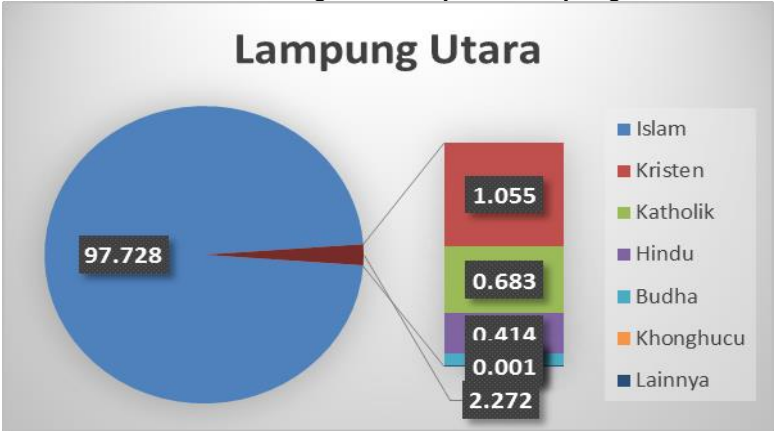
Gambar 5.20. Persentase Agama Kabupaten Lampung Timur, 2010



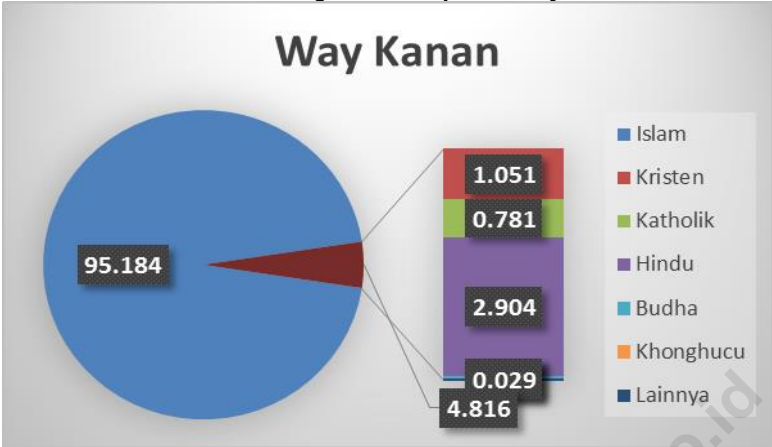
Gambar 5.21. Persentase Agama Kabupaten Lampung Tengah, 2010



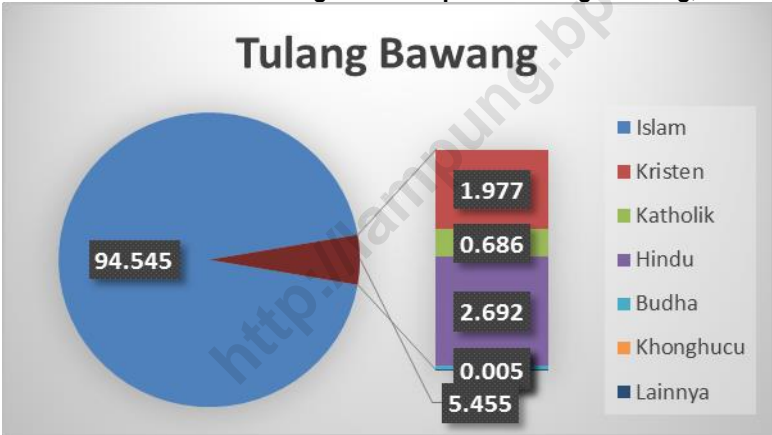
Gambar 5.22. Persentase Agama Kabupaten Lampung Utara, 2010



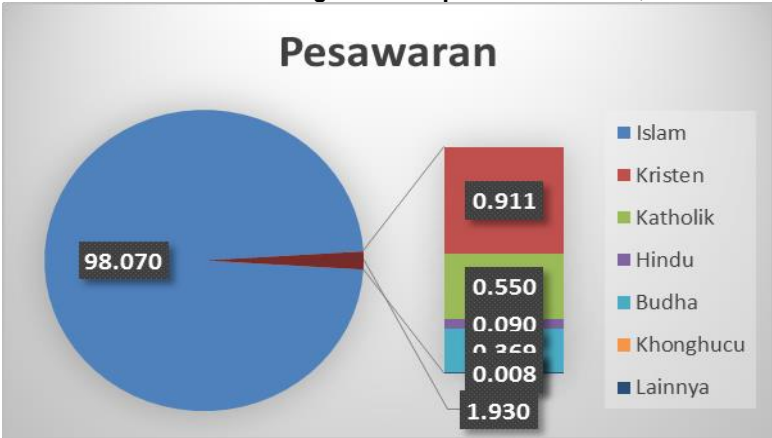
Gambar 5.23. Persentase Agama Kabupaten Way Kanan, 2010



Gambar 5.24. Persentase Agama Kabupaten Tulang Bawang, 2010

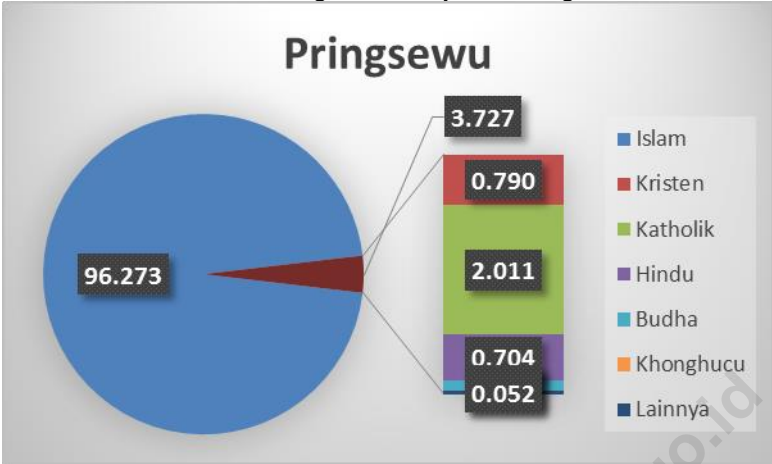


Gambar 5.25. Persentase Agama Kabupaten Pesawaran, 2010

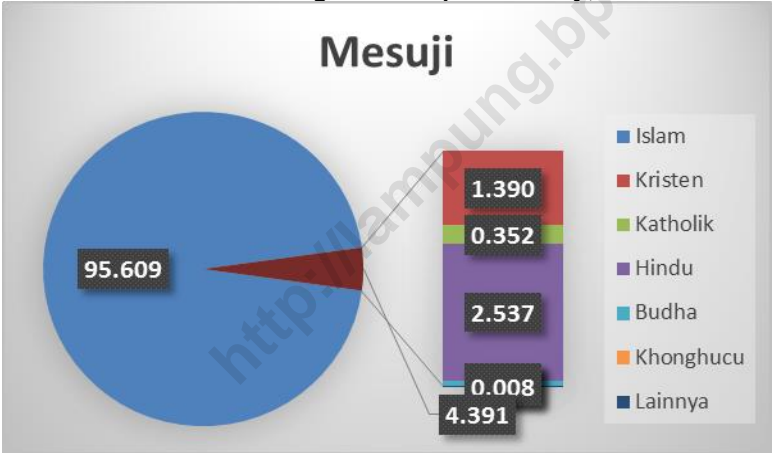




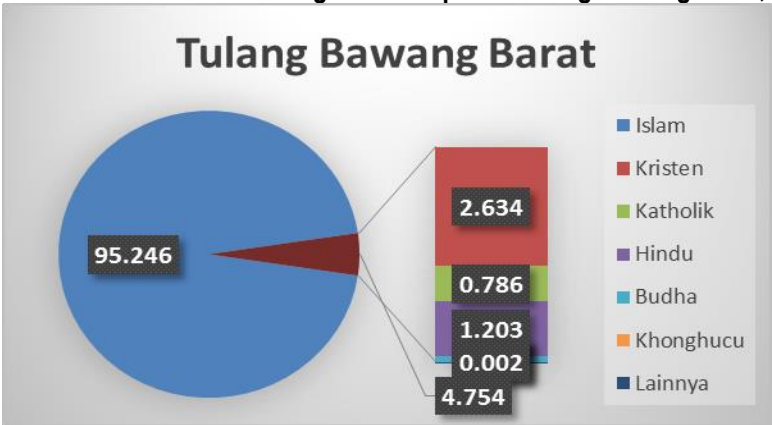
Gambar 5.26. Persentase Agama Kabupaten Pringsewu, 2010



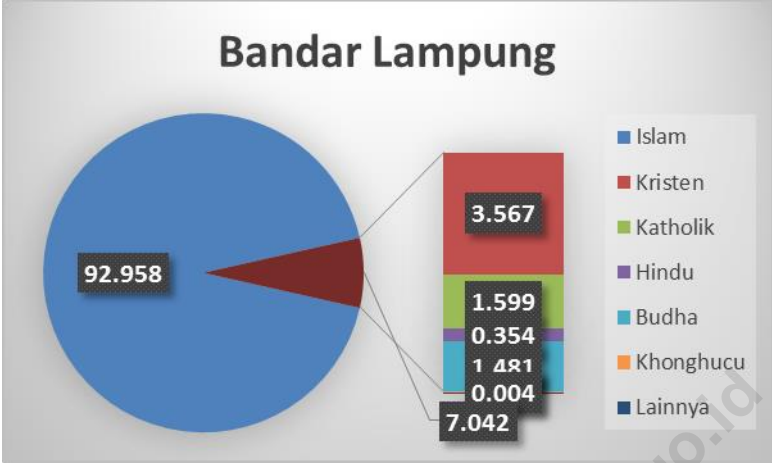
Gambar 5.27. Persentase Agama Kabupaten Mesuji, 2010



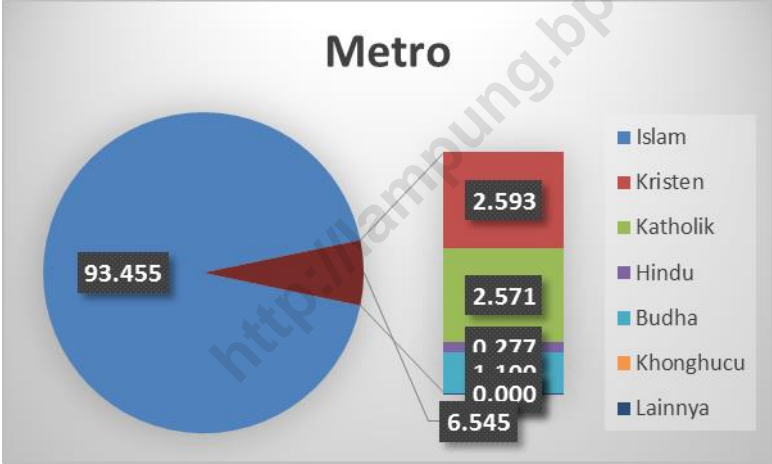
Gambar 5.28. Persentase Agama Kabupaten Tulang Bawang Barat, 2010



Gambar 5.29. Persentase Agama Kota Bandar Lampung, 2010



Gambar 5.30. Persentase Agama Kota Metro, 2010



# DATA

MENCERDASKAN BANGSA

— *Enlighten The Nation* —

<http://lampung.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI LAMPUNG**

Jl. Basuki Rahmat No. 54 Bandar Lampung , 35215

Telp (0721) 482909, Fax (0721) 484329

Email : [bps1800@bps.go.id](mailto:bps1800@bps.go.id)

Homepage : [//lampung.bps.go.id](http://lampung.bps.go.id)